

BAB II

GERAKAN SOSIAL ISLAM LOKAL

A. Pengertian Protes dan Gerakan Sosial

Istilah protes menurut Poerwadarminta,¹ mengandung pengertian sebagai pernyataan tak menyetujui, menyanggah, menyangkal, menolak, dan lain-lain. Protes dapat dilakukan secara individual atau kolektif dalam berbagai bentuk, misalnya aksi unjuk rasa, pembangkangan, penolakan membayar pajak, mogok kerja, petisi, dan lain-lain.

Menurut Lofland,² yang mengumpulkan istilah protes dari berbagai kamus, kata protes itu adalah kata benda dan kata kerja yang mengandung pengertian; pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan; keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan; ekspresi penolakan secara lugas; deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau saat membayar pajak atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan dan menuntut hak untuk melakukan klaim guna menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela; menyatakan (sesuatu hal) secara terbuka dimuka umum; melakukan deklarasi penolakan tertulis secara

¹ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta*, (Jakarta: penerbit Pusat Bahasa dan Sastra Indonesia, 1976),776.

² Lebih lanjut Lofland mengatakan bahwa dari pengertian protes yang terdapat di sejumlah kamus tersebut, kata protes itu mengandung beberapa dimensi sebagai berikut: (1) penolakan atau keberatan; (2) atas sesuatu yang berseberangan; (3) yang sudah tidak dapat ditoleransi; (4) yang ditujukan kepada pribadi atau lembaga yang berkuasa; (5) secara beramai-ramai dan resmi; (6) yang dilakukan secara terbuka; (7) dan didasari oleh perasaan ketidakadilan. Lihat lebih jelasnya dalam Jhon Lofland, *Protes: Suatu Studi Tentang Perilaku Kelompok dan Gerakan Sosial*, terjemahan Luthfi Ashari.(Yogyakarta:INSIST Press, 2003), 2.

formal; bersumpah; berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai; mendudukan masalah pada proporsinya.

Dalam perkembangannya kata protes itu kemudian diboboti dengan konsep, sehingga kata protes ini memiliki persamaan dengan tindakan kolektif, sebab orang-orang atau kumpulan orang yang melakukan aksi protes itu bertindak secara kolektif dengan mengusung tujuan tertentu. Sebagaimana dikemukakan Tilly³ bahwa konsep protes itu memiliki persamaannya dengan konsep aksi kolektif (kumpulan bertujuan). Meskipun Tilly mengakui adanya persamaan antara konsep protes dan tindakan kolektif. Namun, ia menolak menggunakan konsep protes tersebut dikarenakan dua hal: Pertama, kata “protes” dan “pemberontakan,” “kekacauan,” “gangguan” atau istilah sejenisnya --- dari sudut pandang penguasa tampak mencerminkan adanya niat dan posisi politik si pelaku. kedua, melihat protes hampir indentik dengan kata-kata “kejahatan” dan “kerusuhan” sebagai cara untuk menggambarkan perilaku kolektif berupa kekerasan massal, penjarahan dan kekacauan⁴

Protes dalam konteks perilaku kolektif tersebut mencerminkan bahwa kehidupan sosial tidak selamanya berjalan sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk protes yang dilakukan anggota masyarakat secara kolektif, seperti unjuk rasa atau demonstrasi. Terlebih lagi norma, peraturan dan hukum itu datang dari

³ Lihat lebih lanjut dalam Louise A Tilly, dan Charles Tilly (eds), *Class Conflict and Collection Action*. (Baverly Hills: Sage. 1981), 17.

⁴Dalam konteks ini, Lofland menegaskan bahwa protes dapat dikatakan sebagai sebuah aksi, kumpulan, peristiwa, atau bentuk perilaku kolektif yang kemunculannya didorong dan dihambat oleh beragam konteks perilaku kolektif dan muncul disebabkan oleh bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya. (Yogyakarta:INSIST Press, 2003), 30.

pemerintahan yang otoriter, dan hal tersebut hanya menguntungkan penguasa dari pada masyarakat. Dalam arti, norma, peraturan dan hukum dirancang untuk mendukung atau melanggengkan kekuasaan, sehingga ruang kebebasan masyarakat terasa dibatasi. Tentu saja kondisi ini, cepat atau lambat, akan muncul ketidakpuasan secara kolektif dalam bentuk protes.

Pengertian gerakan sosial, menurut Lorenz Von Stein,⁵ tidak lagi terbatas dengan gerakan buruh pada abad ke-19, atau gerakan petani, sebab aktor dari gerakan sosial di abad ke-20 sama sekali telah berubah. Perubahan ini membawa pergeseran makna gerakan sosial itu sendiri. Perubahan yang terjadi dari pengertian gerakan sosial adalah adanya pluralisasi dan melepaskan diri dari kerangka historis dan digunakan untuk menyebutkan beragam fenomena perilaku kolektif: mulai dari praktek dan sekte agama hingga gerakan protes, termasuk revolusi yang terorganisir.

Namun Sztomka⁶ memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian dari gerakan sosial tersebut. Dia mengatakan bahwa rumusan mengenai pengertian gerakan sosial haruslah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: (1) kolektivitas orang bertindak bersama; (2) tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama; (3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi formal; dan (4) tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang relatif tinggi namun terlembaga dan bentuknya tidak konvensional.

⁵ Lihat lebih detail dalam Adam dan Jessica Kuper, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (SAGE Publications, 2000), 99.

⁶ Lihat lebih lanjut dalam Sztomka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 325.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan sosial itu merupakan tindakan kolektif yang spontan dan tak terlembaga guna menghasilkan perubahan yang lebih baik. Penekanan dari pengertian gerakan sosial ini dapat dilihat dari berbagai pandangan para ahli gerakan sosial. Blumer mengatakan,⁷ gerakan sosial adalah usaha kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Hal senada dikemukakan pula oleh Smelser⁸ bahwa gerakan sosial itu adalah tindakan kolektif untuk mengubah norma dan nilai.

Menurut Touraine,⁹ gerakan sosial merupakan interaksi yang berorientasi normatif antara lawan atau saingan beserta penafsiran yang sarat konflik dengan modal masyarakat yang berlawanan dari sebuah medan budaya bersama. Rumusan gerakan sosial Touraine ini tidak luput dari model identitas murni yang dikembangkannya. Namun, model identitas diri ini mengandung bahaya, terutama bangkitnya kelompok-kelompok komunal, sektarian, etnis, dan fundamentalis dalam kerangka pencarian identitas, otonomi dan pengakuan. Model ini berbahaya karena ruang kajian mengenai gerakan sosial akan terjebak menjadi studi mengenai kelompok tertutup atau sekte dan organisasi rahasia.¹⁰

⁷ Lihat lebih lanjut dalam, Herbert Blumer, "Collective Behaviour", dalam Gitler J.B. (ed.), *Review of Sociology: Analysis of a Decade*, (New York: John Wiley and Son 1957), 154. Lihat juga dalam karya senada "Collective Behaviour" dalam Lee A.M (ed.), *Principle of Sociology*, (New York: Barnes and Noble. 1951), 199.

⁸ Periksa dalam Smelser, Neil. *Theory of Collective Behaviour*, Third Impression, (London: Routledge & Kegan Paul, 1970). 2.

⁹ Periksa dalam Touraine, A.. "Sosial Movement and Sosial Change" dalam Orlando Fals Bonda (ed.) *The Challenge of Sosial Change*. (London: Sage 1985.), 31-32.

¹⁰ Pengertian mengenai gerakan sosial tersebut berbeda dengan para sosiolog lainnya, seperti dikemukakan Turner dan Killian bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang perubahan dalam suatu masyarakat. Tetapi gerakan sosial sebagai manifestasi dari usaha bersama ini sangat menentukan peranannya. Namun, pernyataan ini perlu dibatasi karena gerakan sosial berbeda dengan partai. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa anggota di dalam gerakan sosial sangat cair, berbeda halnya dengan anggota partai politik yang ditentukan dengan kartu anggota partai lihat dalam Turner, Ralph H

Meskipun terdapat hal yang berbeda dalam mengartikan gerakan sosial yang disebabkan cara pandang berlainan, pada dasarnya gerakan sosial merupakan usaha bersama dalam melakukan perubahan atau sebaliknya. Gerakan sosial itu mengandung pengertian suatu gerakan bersama, suatu kekacauan di antara manusia, suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya perubahan dalam lembaga sosial tertentu. Hal ini berbeda dengan partai politik atau kelompok penekan, karena walaupun mempunyai kelompok tertentu yang terorganisir secara formal, gerakan demikian bukanlah kelompok yang terorganisir.

Tak dapat dipungkiri bahwa antara gerakan sosial dan perilaku kolektif itu memiliki kemiripan, namun kiranya perlu dibedakan, sebab perilaku kolektif itu ditandai dengan spontanitas dan ketiadaan struktur internal. Hal ini berbeda dengan gerakan sosial yang memiliki tatanan internal dan merupakan tindakan yang bertujuan atau aksi kolektif yang bertujuan, sebab aksi kolektif ini terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan yang sama, misalnya, menghendaki partisipasi rakyat di dalam kebijakan-kebijakan negara yang bertalian dengan masalah publik, atau aksi kolektif itu menghendaki pemerintah yang bersih sehingga segala bentuk korupsi ditentang karena dianggap dapat merugikan kehidupan masyarakat.

dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, (New Jersey: Prentice-Hall-Englewood Cliffs. 1972), 246.

Menurut Tarrow dan Tilly,¹¹ satu-satunya kesamaan di antara beberapa rumusan mengenai pengertian gerakan sosial adalah gerakan sosial merupakan kelompok-kelompok yang bersifat tidak melembaga dari berbagai anggota masyarakat yang tidak terwakili dan bergerak dalam alur interaksi yang berseberangan dengan elit atau pihak oposisi. Ini berarti gerakan sosial itu senantiasa terdiri dari sejumlah individu-individu yang tidak puas dan berkeinginan untuk melakukan perubahan ini kemudian menjelma menjadi suatu kolektifitas bertujuan atau kelompok-kelompok. Kelompok yang tak terlembaga ini kemudian bergerak *vis a vis* dengan penguasa guna melakukan perubahan. Namun, ada juga kelompok-kelompok yang terorganisir dan dimobilisasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

B. Gerakan Sosial sebagai Manifestasi Protes

Gerakan sosial pada dasarnya merupakan manifestasi protes terhadap keadaan yang buruk dan berusaha mengubahnya. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Sartono Kartodirdjo¹² mengatakan bahwa salah satu dari enam jenis gerakan sosial adalah gerakan memprotes keadaan atau peraturan yang tidak adil. Protes sebagai gerakan sosial ini memang merupakan hasil pengamatan Sartono Kartodirdjo mengenai gerakan protes petani di Indonesia sehubungan dengan perlakuan yang tidak adil. Dengan perkataan lain, gerakan

¹¹ Lihat lebih jelasnya dalam Charles Tilly, Doug McAdam & Tarrow. *The Dynamic of Contentious*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2000).7.

¹² Lihat dalam, Sarlito W. Saewono. "Aksi Mahasiswa Bukan Aksi Massa" dalam Dedy Djamaludin Malik, *Gejolak Reformasi Menolak Anarki: Kontroversi Seputar Aksi Mahasiswa Menuntut Reformasi Politik Orde Baru*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia. 1998). 87.

protes sebagai gerakan sosial ini telah dilakukan petani Indonesia baik ketika di bawah pemerintahan kolonial maupun pasca-pemerintahan kolonial.

Penelitian Soegianto Padmo menggambarkan gerakan protes yang dilakukan petani Klaten. Protes petani Klaten ini ditujukan kepada kebijakan pemerintah yang terjadi pada tahun 1960-an, sedangkan gerakan protes petani Klaten yang ditujukan kepada tuan tanah terjadi pada tahun 1964 - 1965. Gerakan protes yang dilakukan petani terhadap kebijakan pemerintah dan tuan tanah ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau kelompok.

Menurut Sills,¹³ gerakan protes memungkinkan bertransformasi menjadi gerakan sosial. Gerakan buruh pada mulanya adalah gerakan protes dan serikat buruh yang kerap bertindak sebagai kelompok penekan untuk mendesak perubahan yang diinginkan. Karena itu gerakan buruh tidak hanya terpaku sebagai kelompok penekan, melainkan membangun pula suatu program aksi politik yang komprehensif atau mengelaborasi ideologi sehingga menjadi sebuah gerakan yang melancarkan perubahan. Dalam konteks ini, gerakan buruh yang semula hanya merupakan gerakan protes sebagaimana gerakan protes yang dilakukan para petani, tentu saja gerakan protes baik yang dilancarkan kaum buruh maupun petani tersebut dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial.

Dalam konteks gerakan sosial, gerakan petani dan gerakan buruh yang bisaannya disebut sebagai gerakan sosial lama (*old social movement*) ini aktornya adalah petani dan buruh. Hal ini berbeda dengan gerakan sosial baru (*new social*

¹³ Lihat dalam David L. Sills., *International Encyclopedia of the Sosial Sciences*, (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), 439.

movement) yang aktornya bukan lagi buruh atau petani, melainkan sangat beragam. Terlepas dari kategorisasi tersebut, yang jelas gerakan sosial baik aktornya petani, buruh maupun aktivis perempuan, aktivis lingkungan, aktivis hak-hak asasi manusia dan lainnya, gerakan mereka senantiasa dirujuk sebagai “gerakan protes.”

Gerakan sosial sebagai manifestasi gerakan protes ini merupakan istilah yang bisaanya digunakan untuk gerakan massa. Gerakan protes ini berusaha untuk menghilangkan keluhan atau ketidakpuasan yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti gerakan kaum negro atau gerakan oposisi yang akan melakukan perubahan sosial dan politik pada masa lalu yang menempatkan kaum kulit putih sebagai yang “istimewa” seperti gerakan Ku Klux Klan.¹⁴

Mohammed M. Hafez dan Quintan Wictorowics meneropong gerakan protes yang berujung pada terciptanya gerakan sosial keagamaan di Mesir yang berkesimpulan bahwa perlawanan dengan kekerasan di dalam gerakan Islam di Mesir menjadi repertoar protes yang makin diterima pada tahun 1990-an karena terciptanya suatu struktur kesempatan politik.¹⁵

¹⁴ Lihat dalam Sills, *International Encyclopedia...* 639.

¹⁵ Ada tiga perkembangan menyangkut struktur kesempatan politik khusus untuk kasus Mesir ini, pertama deliberalisasi sistem politik, setelah kemajuan yang nyata meski terbatas pada 1980-an, memberikan konteks bagi pemerintah yang terdelegitimasi untuk mengandalkan terbatasnya akses ke dalam perlawanan melalui kelembagaan.. kedua watak reaktif dari represi negara terhadap militant Islam Mesir Hulu member kelompok Islamis alat organisasional untuk melawan represi. Ketiga, represi serampangan member kaum kalangan Islamis justifikasi tambahan untuk memberontak, seperti ditunjukkan oleh pernyataan dan selebaran mereka. Untuk lebih jelas masalah ini lihat Mohammed M. Hafez dan Quintan Wictorowics, *Gerakan Islam di Mesir: kekerasan sebagai Perlawanan*, (Jakarta: Gading publishing dan Paramadina. 2012), 168.

Gerakan sosial, menurut Lofland,¹⁶ haruslah terdiri dari (a) adanya organisasi kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara independen; (b) bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana (terutama kumpulan) secara cepat; (c) kebangkitan opini massa; (d) semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral dan (e) sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur makro dan atau mikro dari lembaga-lembaga sentral.

C. Ragam Gerakan Sosial

Gerakan sosial sangat beragam, karena itu David Arbele, seperti dikutip Arief Budiman,¹⁷ mengklasifikasikan gerakan sosial dengan menggunakan kriteria mengenai perubahan yang dikehendaki (perubahan perseorangan dan perubahan sosial) dan besarnya perubahan yang diinginkan (perubahan untuk sebagian atau perubahan, menyeluruh). Bertolak dari pemikiran ini, Arbele membuat tipologi mengenai gerakan sosial sebagai berikut:

- (1) *Alterative movement* adalah gerakan yang bertujuan mengubah sebgaiian perilaku perseorangan, Dalam kategori ini dapat kita masukkan berbagai kampanye untuk mengubah perilaku tertentu, misalnya kampanye agar orang tidak merokok, tidak minum-minuman keras dan tidak menyalahgunakan zat yang memabukan seperti narkoba.

¹⁶ Lihat dalam Lofland: *Protes...* 25.

¹⁷ Lihat lebih detail dalam Budiman, Arief dan Tornquist Olle. *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. 2000), 67.

- (2) *Redemptive movement* adalah gerakan yang melakukan perubahan menyeluruh pada perilaku peseorangan. Gerakan ini umumnya terdapat di dalam bidang agama, misalnya seseorang bertobat untuk melakukan perubahan mengenai cara hidupnya yang sesuai dengan ajaran agama.
- (3) *Reformative movement* adalah gerakan yang ingin mengubah bukan perseorangan, melainkan merubah masyarakat, tetapi ruang lingkup yang akan diubah hanya mencakup segi-segi tertentu dari masyarakat.
- (4) *Transformative movement* adalah gerakan yang bertujuan untuk merubah masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, ada empat tipe gerakan sosial yang dirumuskan oleh Aberle. Empat tipe gerakan sosial tersebut dirumuskan berdasarkan derajat perubahan maupun tempat perubahan berlangsung, seperti tampak dalam gambar di bawah ini.

Tabel 2.1
Tipe Gerakan Sosial Melalui Orientasi Perubahan

	Perubahan Perorangan	Perubahan Sosial
Sebagian	Alterative Movements	Reformative Movements
Menyeluruh	Redemptive Movement	Transformative Movements

Namun, penggolongan gerakan sosial tersebut di atas berbeda dengan penggolongan gerakan sosial dari Kornblum. Penggolongan gerakan sosial Kornblum menggunakan tujuan yang akan dicapai gerakan sosial sebagai patokannya. Bertolak dari pemikiran ini, Kornblum,¹⁸ merumuskan ada empat jenis gerakan sosial, yaitu:

- (1) Gerakan revolusioner (*revolutionary movement*) adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan institusi dan stratifikasi masyarakat;
- (2) Gerakan reformis (*reformist movement*) adalah gerakan yang hanya bertujuan untuk mengubah sebagian institusi atau nilai;
- (3) Gerakan konservatif (*conservative movement*) adalah gerakan yang hanya bertujuan untuk mempertahankan sebagian institusi atau nilai;
- (4) Gerakan reaksioner (*reactionary movement*) adalah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke institusi dan nilai di masa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai sekarang, seperti gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Gerakan ini berusaha mengembalikan Amerika Serikat kepada masa lampau ketika institusi sosial mendukung azas keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam.

Gerakan sosial yang beragam tersebut melewati batas batas regional, nasional dan internasional dengan mudah. Hal ini disebabkan perkembangan

¹⁸ Lihat lebih jelas dalam Sidney Tarrow, *Power In Movement: Sosial Movement, Colective Action and Mass Politic in Modern State*. (Cambridge: Cambridge University Press1994), 56.

komunikasi teknologi yang pesat, baik cetak maupun elektronik, sehingga gerakan sosial yang terjadi di belahan dunia lain segera diketahui masyarakat. Pada gilirannya gerakan tersebut mempengaruhi atau memberikan inspirasi bagi kelompok-kelompok pergerakan sosial yang terdapat di belahan dunia lainnya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana ide dan pola-pola gerakan sosial kerap ditiru oleh gerakan sosial di tempat lainnya.

Dalam kaitan ini, Gabriel Tarde¹⁹ dalam bukunya *Les Lois de l'imitation* (1890) yang diterjemahkan E.C. Parson ke dalam bahasa Inggris *The Laws of Imitation* (1903), pada dasarnya menjelaskan bahwa “*people learn from one another through the process of imitation*” (orang belajar dari orang lain melalui peniruan). Dalam konteks ini, gerakan sosial yang kerap ditiru oleh gerakan sosial lainnya, dikemukakan John Markoff.²⁰ Menurutnya, setidaknya terdapat empat aspek di dalam gerakan sosial yang seringkali ditiru oleh gerakan sosial di tempat lainnya. Empat aspek tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

Pertama, adanya ide-ide yang luas di dalam gerakan sosial yang dapat berkembang di tempat lainnya, biasanya bersumber dari ketidakadilan sosial, dan berharap terbentuknya struktur tatanan sosial lebih baik, kerap ditiru dan mengelaborasi ide-ide bersifat lokal. Gerakan sosialis pada abad ke-19, misalnya, mengajukan ide-ide umum yang dielaborasi dengan menggunakan variasi-variasi

¹⁹ Lebih lanjut periksa dalam Gabriel Tarde, Sumber-sumber Psikologi Sosial dalam Philip Cabin dan Jean Franqois Dortier (ed), *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004), 121.

²⁰ Lihat lebih jelasnya dalam Markoff. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, terjemahan Ari Setyaningrum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002). 50-55.

masalah nasional yang ada. Di Indonesia, ide-ide demokrasi dan hak asasi manusia dielaborasi dengan masalah-masalah nasional.

Kedua, pembentukan aksi publik di tempat *setting* yang lain, kemudian dipindahkan ke *setting* nasional atau lokal, seperti aksi menduduki jalan yang dipelopori sejumlah orang kulit hitam yang bersikeras untuk dilayani oleh pemerintah di depan kantor pelayanan sosial untuk makan siang di Grensborro, Carolina Utara, Amerika Serikat. Kemudian aksi duduk-duduk di jalanan ini digunakan mahasiswa di seluruh Eropa Barat dengan tujuan yang berbeda. Peran televisi sangat besar dalam menyebarkan bentuk-bentuk protes sosial.

Ketiga, meniru penggunaan simbol atau slogan. Penggunaan simbol atau slogan yang tepat akan memberikan kontribusi yang besar bagi gerakan sosial. Simbol atau slogan yang digunakan haruslah memiliki arti yang bersifat lokal. Dalam konteks ini pengertian keadilan sosial haruslah merupakan interpretasi terhadap kondisi lokal, atau memiliki arti lokal. Slogan yang digunakan gerakan mahasiswa 1998: reformasi sampai mati. Reformasi artinya Presiden Soeharto harus turun sekarang juga. Kata “reformasi” ini menjadi magnet yang menyatukan gerakan mahasiswa ketika menumbangkan Soeharto.

D. Arah Gerakan Sosial

Perubahan sosial terjadi dikarenakan berbagai penyebab, di antaranya perubahan sosial disebabkan kekuatan *ideas* atau ide. Max Weber dalam bukunya *Sociology of Religion* dan *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*²¹ menekankan bahwa ide sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Sejumlah

²¹ Lihat lebih detail dalam George Ritzers. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta : Prenada Media, 2012). 234.

peneliti Max Weber menegaskan bahwa tesis Weberianisme adalah pengakuan terhadap peranan yang besar dari ideologi sebagai variabel independen bagi perkembangan masyarakat. Di samping itu, perubahan sosial terjadi karena digerakkan oleh tokoh-tokoh besar (*great individual*) atau para pahlawan (*heroes*) seperti dikemukakan Thomas Carlyle bahwa sejarah dunia adalah biografi orang-orang besar. Dengan kata lain, sejarah mencatat bahwa perubahan sosial terjadi dikarenakan munculnya tokoh atau pahlawan yang mampu menarik para pengikutnya untuk melancarkan gerakan guna melakukan perubahan masyarakatnya.²²

Penyebab lain terjadinya perubahan sosial adalah gerakan sosial yang digerakkan masyarakat seperti mahasiswa, ulama, LSM atau *civil society* (masyarakat sipil). Dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di Indonesia yang digerakkan oleh gerakan reformasi, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR-RI Senayan memprotes berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru, dan memaksa Presiden Soeharto mundur serta menuntut reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa; ribuan buruh mogok kerja dan memprotes kebijakan-kebijakan perusahaan yang tidak berpihak pada perbaikan nasib kaum buruh; ribuan kaum petani memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan nasib petani; wajah-wajah perempuan yang memprotes ketidakadilan negara dan ketimpangan gender yang dialami kaum perempuan; ribuan pemuda di berbagai daerah memprotes praktek korupsi yang

²² Lihat lebih detailnya dalam Jalaluddin Rakhmad, *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi?*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999), 55.

telah membuat bangsa ini tak mampu keluar dari krisis berkepanjangan. Semua gerakan ini merupakan gerakan sosial yang pada dasarnya adalah gerakan protes yang menuntut perubahan.

Menurut Sills,²³ gerakan sosial adalah usaha-usaha kolektif yang luas guna melakukan perubahan pada institusi sosial tertentu, atau menciptakan suatu tatanan yang baru sama sekali. Gerakan sosial itu melibatkan sejumlah orang yang terkoordinir dalam sebuah organisasi baik formal maupun non-formal guna melakukan perubahan, atau sebaliknya menantang perubahan itu sendiri. James W Vander Zander²⁴ berpendapat bahwa gerakan sosial adalah suatu usaha yang keras dan terorganisir dilakukan orang-orang dalam jumlahnya relatif besar, tujuannya adalah untuk melakukan perubahan atau menentangnya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, gerakan sosial itu senantiasa ditandai dengan perubahan sosial. Dengan perkataan lain, tidak ada gerakan sosial yang muncul tanpa membawa cita-cita perubahan. Sebab, kemunculan gerakan sosial selalu berusaha melakukan perubahan: dari kondisi yang menindas, tidak adil, dan tak manusiawi menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu gerakan sosial berkait erat dengan perubahan sosial. Karena itu, Wood dan Jackson²⁵ mengatakan bahwa perubahan sosial adalah basis yang menentukan ciri gerakan sosial.

²³ Lihat lebih lanjut dalam Sills., David L.. *International Encyclopedia* ...322.

²⁴ Lihat lebih detail dalam George Ritzers., *Teori Sosiologi Klasik*... 221.

²⁵ Lihat lebih detail dalam Sztomka, 2004. *Sosiologi Perubahan*... 341.

Sebagaimana dikatakan Sztompka, hubungan yang erat antara gerakan sosial dan perubahan sosial itu memerlukan beberapa penjelasan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, perubahan sosial sebagai tujuan utama gerakan sosial mempunyai arti berbeda. Di satu sisi, tujuan gerakan sosial dapat dipandang positif, dalam arti memperkenalkan sesuatu yang belum pernah ada, misalnya, pemerintah atau rezim politik baru, adat baru, hukum dan pranata baru. Di sisi lain, tujuan gerakan sosial bisa dilihat sebagai hal negatif, dalam arti dapat mencegah, menghentikan atau membalikkan proses perubahan yang tak berkaitan dengan gerakan sosial, misalnya, kemerosotan kualitas lingkungan alam, kenaikan angka fertilitas dan peningkatan angka kejahatan, atau aktivitas dari gerakan lain.

Kedua, gerakan sosial mempunyai berbagai status penyebab berkaitan dengan perubahan. Di satu pihak, gerakan sosial dapat dianggap sebagai penyebab utama perubahan, yaitu sebagai kondisi yang diperlukan dan cukup untuk menimbulkan perubahan. Masalahnya adalah agar gerakan sosial dapat berhasil, diperlukan lingkungan sosial yang kondusif dan struktur yang mendukung. Sedangkan di lain pihak, gerakan sosial dapat dilihat sebagai dampak *efiphenomena* atau gejala yang menyertai proses yang dikembangkan oleh daya dorongnya sendiri atau momentumnya sendiri, misalnya modernisasi, urbanisasi dan kemunculan massa atau krisis ekonomi yang tiba-tiba.

Ketiga, biasanya perubahan sosial yang disebabkan gerakan sosial dilakukan di dalam masyarakat yang berada di luar gerakan itu sendiri. Gerakan

sosial seolah-olah merupakan tindakan terhadap masyarakat dari luar. Padahal, gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Namun, perubahan sosial yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal dari gerakan sosial itu sendiri seperti anggota, ideologi, pranata, bentuk organisasi dan sebagainya. Sedangkan perubahan eksternal terjadi di dalam masyarakat yang luas seperti hukum, rezim politik, dan budayanya, yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggota dan strukturnya sendiri, perubahan lingkungan maupun aktornya seperti motivasi, ideologi dan lain lain.²⁶

E. *Civil Society* Sebagai Arena Gerakan Sosial

Konsep masyarakat sipil (*civil society*) merupakan gagasan lama yang digunakan kembali oleh para ahli ilmu sosial kontemporer. Gagasan *civil society* ini berakar dalam sejarah pemikiran filsafat. Filsuf Aristoteles menyebut *civil society* dengan istilah *koinia politike* dan Filsuf Cicero menggunakan istilah *societas civilis* yang berarti masyarakat politik atau komunitas politik.²⁷

Konsep *civil society* ini kemudian muncul kembali pada abad ke-17 ketika dipergunakan Adam Furguson saat menulis buku *An Essay on the History of Civil Society* (1773). Dalam buku ini, Adam Furguson memberikan pengertian *civil society* sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang kuat dalam mengimbangi negara, sehingga tidak dapat didominasi dan despotisme negara.²⁸

²⁶ Lihat lebih detail dalam Sztomka, *Sosiologi Perubahan...* 345.

²⁷ Periksa lebih lanjut dalam Sligman, Adam B. *The Idea of Civil Society*. (New York: The Free Press. 1992), xxi.

²⁸ Periksa lebih lanjut dalam Fanja Oz-Salzberger.. "Introduction" dalam Adam Furguson *An Essay on History of Civil Society*. (Cambridge: Cambridge University Press. 1995), xix.

Pandangan lain mengenai *civil society* dapat dilihat dari pemikiran Gramsci. Menurut Gramsci, konsep *civil society* ini mencakup organisasi-organisasi swasta (*private*) seperti gereja, serikat dagang, sekolah dan sebagainya. *Civil Society* merupakan arena bagi negara untuk mendominasi dan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Berbeda halnya dengan masyarakat politik atau negara (*state*) yang merupakan hubungan-hubungan *koersif* yang terwujud dalam berbagai lembaga negara seperti militer, polisi, lembaga hukum dan penjara, termasuk semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan sebagainya

Pemilahan *civil society* dan masyarakat politik atau negara (*state*) tersebut berada pada level suprastruktur. Kedua level suprastruktur tersebut menghadirkan dua wilayah yang berbeda, yaitu ranah persetujuan adalah *civil society*, dan ranah kekuatan adalah masyarakat politik atau negara. Dua level suprastruktur ini menjalankan fungsi kontrol sosial politik yang berbeda. Sebagaimana ditegaskan Gramsci bahwa kedua level pada satu sisi berhubungan dengan fungsi 'hegemoni', dan di lain sisi berhubungan dengan 'dominasi langsung'.

Pandangan Gramsci mengenai *civil society* tersebut di atas berbeda dengan Karl Marx yang menempatkan secara ketat posisi *civil society* sebagai proses supra-struktur dimana proses perebutan kekuasaan berlangsung. Sedangkan Gramsci menempatkan posisi *civil society* dan negara (*state*) berada pada level supra-struktur. Sedangkan infra-struktur, menurut Gramsci, adalah cara produksi ekonomi atau sistem ekonomi masyarakat. Bertolak dari konsep ini,

gagasan Gramsci mengenai *civil society* ini memiliki sifat kemandirian dan politik.²⁹

Sementara itu, Alfred Stepan (1996) memandang bahwa *civil society* adalah salah satu arena penting dalam sebuah masyarakat bernegara, di samping *political society* dan *the state*. Masyarakat sipil (*civil society*) adalah arena bagi berbagai gerakan sosial serta organisasi masyarakat sipil dari semua kelas untuk menyatakan diri dan memajukan berbagai kepentingan mereka. Sedangkan Anthony Giddens, melihat bahwa *civil society* sebagai bentuk aksi sosial kolektif (*the forms of collective action*) dalam perspektif mencari gerakan sosial sebagai refleksi kelembagaan yang kontradiktif dengan modernitas.³⁰

F. Ragam Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang muncul di berbagai negara menjadi perhatian bagi sejumlah ahli sosiologi. Untuk memahami gerakan sosial yang muncul dan berkembang di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia, kiranya tidaklah keliru bila terlebih dahulu memahami teori gerakan sosial itu sendiri, sebab dengan memahami teori gerakan sosial tersebut akan memudahkan kita memahami fenomena gerakan sosial yang muncul. Di dalam gerakan sosial terdapat empat teori gerakan sosial, seperti teori perilaku kolektif (*collective behavior theory*), teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*), teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*) dan teori proses politik (*political process theory*). Empat teori gerakan sosial ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Penjelasan tentang hal ini lebih detailnya lihat dalam Haynes, Jeff. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2000.), 78.

³⁰ Lihat lebih detail dalam Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000), 44.

1. Teori Perilaku Kolektif (*Collective Behavior Theory*)

Teori perilaku kolektif ini tidak luput dari akar pemikiran struktural fungsionalisme dan interaksionisme, di samping pemikiran lainnya. Dalam perspektif struktural fungsionalisme dan interaksionisme inilah teori perilaku kolektif ini akan dilihat dari berbagai pemikiran tokoh-tokohnya sesuai dengan akar teori yang mereka anut, atau yang mereka yakini.

Pemikiran interaksionisme merupakan teori dalam sosiologi yang dikembangkan George Herbert Mead. Karena itu tradisi pemikiran teori perilaku kolektif (*collective behaviour*) senantiasa dihubungkan dengan aliran pemikiran interaksionisme, di samping pemikiran Chicago. Robert E. Park yang dikenal sebagai “bapak perilaku kolektif” Amerika bersama koleganya, Ernest W Burgess, menulis buku teks yang berjudul *Introduction to the Science of Sociology*. Dalam buku ini terdapat bab khusus yang mengulas perilaku kolektif. Menurut Park dan Burgess, perilaku kolektif itu adalah perilaku dari individu yang berada di bawah pengaruh dorongan hati yang lazim dan kolektif. Dengan kata lain, perilaku kolektif itu merupakan hasil dari interaksi sosial. Bertolak dari rumusan ini, maka Park dan Burgess memasukkan kerusuhan sosial (*social unrest*), gerakan massa (*mass movement*), kebangkitan kembali (*revival*), kerumunan (*crowds*), perubahan (*reform*), revolusi (*revolutions*) sebagai perilaku kolektif.³¹

Herbert Blumer, salah seorang murid Robert E. Park, yang dianggap tokoh penting dalam teori perilaku kolektif yang juga dikenal sebagai murid

³¹ Periksa lebih detail dalam Park, E. Robert & Burgess W. Ernest.. *Introduction to the Science of Sociology*, (Chicago: University of Chicago Press. 1921), 865.

George Herbert Mead ini menegaskan bahwa tidaklah mengherankan kalau pemikiran interaksionisme mempengaruhi pemikirannya. Sebagaimana dikemukakan Neidhardt dan Rucht, kontribusi pemikiran Blumer yang penting dalam teori perilaku kolektif ini adalah penggolongan dan mengklasifikasikan mengenai gerakan. Blumer kemudian membagi perilaku kolektif menjadi lima golongan, yaitu: (1) perilaku kerumunan seperti panik dan kerusuhan; (2) perilaku massa bersifat kolektif tapi tidak terorganisir; (3) publik dan opini publik; (4) propaganda, psikologi perang dan taktik komunis; (5) gerakan sosial (dengan beragam coraknya).³²

Selain itu, Blumer³³ memandang gerakan sosial bukanlah hal yang irasional, melainkan sebaliknya ia memandang gerakan sosial sebagai hal yang kreatif. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa gerakan sosial adalah “ sebuah jalan utama untuk menuju masyarakat modern dengan cara membangunnnya kembali” sedangkan “kemunculan tatanan sosial baru sejalan dengan tumbuhnya bentuk-bentuk kolektif yang baru.”

Namun, menurut Turner dan Killian,³⁴ teori yang penting dari Blumer adalah pemikirannya mengenai keluhan (*grievance*), Keluhan ini seharusnya telah ditentukan terlebih dahulu, sebelum aksi muncul. Dalam kaitan ini, ditegaskan bahwa problem sosial bukan hasil dari kegagalan masyarakat secara

³² Lihat lebih detail dalam Neidhardt Friedhelm dan Ruch Dieter.. “The Analysis of Sosial Movements: The State of the Art and Some Perspective for Further Reseachr”, dalam Ruch Dieter (ed): *Research on Sosial Movement: The State of the Art in Western Europe and USA*, (Frankfurt: Campus Verlag and Westview Press 1991), 423-464.

³³ Periksa lebih jauh tentang hal ini dalam Blumer, Herbert. “Collective Behaviour”, dalam Gitler J.B. (ed.), *Review of Sociology: Analysis of a Decade*, (New York: John Wiley and Son. Al: 1957), 151.

³⁴ Periksa lebih lanjut dalam Turner, Ralph H dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, (New Jersey: Prentive Hall-Enggelwood Clifts.al: 1972), 26.

intrinsik, melainkan hasil dari suatu proses yang kondisinya sebagaimana terberikan dan teridentifikasi sebagai problem sosial. Ini berarti munculnya problem sosial tidak luput dari proses sosial yang mengkondisikannya sehingga menuntut pemecahannya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana muncul perilaku kolektif yang berupaya untuk melakukan pembaharuan guna menjawab permasalahan sosial yang dihadapi.

Ralph Turner dan Lewis Killian yang juga menganut pemikiran interaksionisme mengembangkan pula teori perilaku kolektif. Mereka memandang perilaku kolektif itu sebagai usaha bersama untuk memperbaiki situasi yang rusak dengan cara membangun kembali secara baik, bukanlah hal yang irasional. pemikiran Turner dan Killian mengenai gerakan sosial dapat diinterpretasikan bukanlah sebagai “mahluk yang patuh,” melainkan sebagai “pencipta perubahan sosial.”

Teori perilaku kolektif juga akan dilihat dari sudut pandang tokoh-tokoh sosiologi yang menganut struktural fungsionalisme, seperti Talcott Parson yang membangun teori struktur-fungsional sebagai kombinasi dari pemikiran Weber dan Durkheim. Bagi Parson, gerakan sosial adalah implikasi dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Perubahan sosial yang besar sangat tergantung pada kemampuan individual, juga reaksi mereka terhadap perubahan itu sendiri.³⁵

Salah seorang penganut struktural fungsional yang lain, Neil Smelser, merumuskan perilaku kolektif dalam lima jenis, yaitu: panik, keranjingan, permusuhan, gerakan berorientasi pada norma dan gerakan berorientasi pada

³⁵ Lihat lebih lanjut dalam Eyerman, Roy dan Jamison Andrew. *Social Movement: A Cognitive Approach*, (Cambridge: Polity Press. 1991),13.

nilai. Konsep kuncinya adalah ketegangan struktural (*structural strain*) yang menyebabkan munculnya perilaku kolektif. Ketegangan struktural ini bukanlah individu yang mengalami frustrasi atau merasakan ketidakadilan, melainkan adanya gangguan dalam sistem sosial yang tak lagi bekerja secara harmonis. Dengan demikian, tidak bekerjanya sistem sosial tersebut mencerminkan adanya kerusakan dari kontrol sosial. Karena itu perilaku kolektif tersebut merupakan sesuatu yang “mengganggu siklus.”³⁶

Smelser³⁷ menjelaskan mengenai mekanisme munculnya gerakan sosial. Mekanisme ini mencakup langkah-langkah gerakan sebagai berikut: (1) generalisasi kepercayaan; (2) ketegangan struktural; (3) faktor-faktor pemicu; (4) mobilisasi partisipan; dan (5) mekanisme kontrol sosial.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa teori perilaku kolektif memandang gerakan sosial sebagai irrasional dan psiko-patologis, meski ada yang berpendirian bahwa gerakan sosial dalam perspektif teori perilaku kolektif itu merupakan bentuk kreativitas. Terlepas dari dua pendirian penganut teori kolektif mengenai gerakan sosial ini, yang jelas teori perilaku kolektif ini mengandung kelemahan dalam melukiskan mekanisme kemunculan dan fungsi gerakan sosial secara sistematis ke arah tahap-tahap perkembangan masyarakat.

2. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)

Teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) yang memusatkan perhatian pada organisasi dan kepemimpinan ini pada dasarnya

³⁶ Lihat ibid, Turner dan Killian *Collective..* 45.

³⁷ Periksa lebih detail dalam Neil Smelser, *Theory of Collective Behaviour*, Third Impression, (London: Routledge & Kegan Paul. 1970), 11.

tidak luput dari pengaruh pemikiran Lenin. Sebagaimana dikemukakan Tarrow,³⁸ pemikiran Lenin yang menciptakan organisasi gerakan untuk melakukan perubahan secara revolusioner. Konsep organisasi gerakan Lenin ini kemudian disebut sebagai “mobilisasi sumber daya” oleh para ahli gerakan sosial di Amerika Serikat.

Teori mobilisasi sumber daya ini, menurut Jenkins dan McAdam,³⁹ memiliki pandangan yang berbeda sama sekali mengenai organisasi gerakan sosial. Menurut teori ini, kemunculan gerakan sosial bukan semata-mata disebabkan peningkatan pada ketersediaan sumber daya di dalam populasi yang merasa dikecewakan. Organisasi gerakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Ketiadaan organisasi berkelanjutan, gerakan tidak akan bertahan lama.

Teori mobilisasi sumber daya tersebut muncul tidaklah serta merta, melainkan kemunculannya disebabkan ada beberapa masalah yang tidak mampu dijawab teori perilaku kolektif, terutama ketika munculnya berbagai gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an di Eropa dan Amerika. Kemunculan gerakan mahasiswa yang menuntut pembaruan ini tak mampu dijelaskan oleh teori perilaku kolektif. Karena itu gelombang gerakan mahasiswa tersebut telah mendorong para ahli untuk merumuskan kembali asumsi-asumsi teoretis yang ada sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan Snow dan Oliver, pendekatan

³⁸Lihat lebih lanjut dalam Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, second edition. (United Kingdom: Cambridge University Press. 1998), 16.

³⁹ Lihat lebih lanjut dalam Bert Klendermans, *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), 78.

sumber daya merupakan reaksi baik kekurangan dari pendekatan teori perilaku kolektif maupun protes mahasiswa yang terjadi pada tahun 1960-an.⁴⁰

Jelas bahwa di samping kelemahan teori perilaku kolektif dalam menjawab protes-protes yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1960-an, juga teori perilaku kolektif yang memandang gerakan sebagai bentuk “perilaku irrasional” mulai ditinggalkan, dan para teoretisi gerakan sosial mulai memfokuskan perhatiannya pada perilaku rasional dari aktor-aktor gerakan. Perubahan ini pada gilirannya, menurut McCarty dan Zald,⁴¹ memunculkan teori mobilisasi sumber daya. Teori ini memperjelas adanya pergeseran dari sosial-psikologi ke arah sosiologi politik dan ekonomi.

Menurut Foweraker,⁴² teori mobilisasi sumber daya ini bertolak dari premis bahwa ketidakpuasan sosial (*social discontent*) adalah universal, sedangkan aksi kolektif tidaklah universal. Kesulitan mengorganisasi gerakan telah menjadi sifat dan problem utama dalam memobilisasi sumber daya untuk mempertahankan atau memperluas gerakan.

Meskipun demikian, dapat dirumuskan secara sederhana bahwa mobilisasi sumber daya ini bertolak dari gagasan mengenai keberhasilan gerakan untuk mendapatkan sumber daya dan kemampuan memperoleh keuntungan dalam

⁴⁰ Lihat Snow, David A dan Oliver Pamela E. “Social Movements and Collective Behavior: Social Psychological Dimensions and Considerations”, dalam Cook Karen S, Fine Gary Alan dan House James S (ed.), *Sociological Perspectives on Social Psychology*, (London: Allyn and Bacon. 1995), 187.

⁴¹ Lihat McAdam, Doug Jhon D. McCarthy Meyer N Zald. *Comparative Perspectives On Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. (United Kingdom: Cambridge University Press. 1999), 98.

⁴² Periksa lebih lanjut dalam A.Budi Susila dan Gito Haryanto. “Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Dominasi Kekuasaan: Studi Kasus di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta”, dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina (ed), *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. (Yogyakarta: INSIST Press. 2003), 45.

pertukaran hubungan dengan kelompok-kelompok lain seperti keberhasilan yang menjadi tujuan dari gerakan. Karena itu, organisasi dan kepemimpinan menjadi sangat penting atau dibutuhkan bagi gerakan yang berorientasi tujuan. Selain itu, haruslah memiliki kemampuan membuat pilihan yang strategis guna meraih tujuan gerakan.

Teori sumber daya menolak keluhan (*grievance*) dan ideologi sebagai penjelasan mengenai munculnya gerakan, sebab keluhan dan ideologi bukanlah secara otomatis menciptakan gerakan sosial atau partai politik, melainkan dikarenakan adanya proses mobilisasi yang berjalan dengan baik. Dikatakan McCarty dan Zald,⁴³ pendekatan mobilisasi sumber daya baik dukungan masyarakat maupun keterbatasan dari gerakan sosial.

Pendekatan ini menguji beragam sumber daya yang harus dimobilisasi, jaringan gerakan sosial terhadap kelompok-kelompok yang lain, kebebasan gerakan atas dukungan eksternal untuk memperoleh hasil yang baik, dan taktik yang digunakan oleh kekuasaan untuk mengontrol atau menggabungkan gerakan.

Menurut Rajendra Singh,⁴⁴ teori mobilisasi sumber daya dalam fokus sentralnya, didasarkan pada sebuah sistem relasi sekumpulan asumsi-asumsi yang terjalin secara aksiomatis. Asumsi-asumsi tersebut adalah: (a) gerakan sosial harus dipahami dalam kerangka model konflik aksi kolektif; (b) tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan non-institusional; (c) baik aksi kolektif institusional maupun non-institusional berisikan serangkaian

⁴³ Lihat McAdam, Doug, Jhon D. McCarthy, Meyer N Zald.. *Comparative...* 65.

⁴⁴ Lihat lebih lanjut dalam Fakih, Mansour. "Tiada Transformasi Sosial Tanpa Gerakan Sosial", dalam buku *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Drs. Zaiyardam Zubir, M. Hum.(Yogyakarta: INSIST Press 2002), 123.

konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan; (d) gerakan sosial melibatkan cita-cita rasional berbagai kepentingan melalui kelompok-kelompok yang saling berkompetisi; (e) tujuan dan penderitaan, konflik dan tanding, semuanya hadir secara inheren dalam seluruh relasi kekuasaan dan, sebagai misal, antar mereka sendiri tidak bisa menjelaskan formasi gerakan sosial; (f) oleh karena itu formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan dalam sumber daya, organisasi, dan kesempatan untuk aksi kolektif; (g) keberhasilan dan keefektifan aksi kolektif dapat dipahami dalam arti keuntungan material atau aktornya dikenali sebagai tokoh politik; dan (h) akhirnya mobilisasi orang dalam gerakan sosial berskala besar merupakan hasil dari teknik komunikasi, birokrasi organisasi, dan dorongan serta inisiatif utilitarianis.

Kritikan terhadap teori mobilisasi sumber daya ini, menurut Foweraker,⁴⁵ berpusat pada ketaatan teori ini terhadap model ekonomi mengenai agen manusia, atau sering disebut sebagai “metodologi individualisme” Hal ini menciptakan dua problem utama, yaitu: Pertama, aktor sosial dianggap sebagai karyawan seperti rasionalitas instrumental yang nyaris menjadi alat jasa karena aksi kolektif senantiasa dihitung untung-ruginya. Itulah sebabnya setiap aksi kolektif mungkin disebabkan adanya keuntungan. Kedua, aktor sosial dianggap melatih rasionalitas tanpa mengacu konteks sosialnya. Dengan tidak memiliki pengetahuan mengenai konteks sosial tersebut, maka tidaklah mungkin

⁴⁵ Periksa lebih lanjut dalam A.Budi Susila dan Gito Haryanto. 2003. “Gerakan... 66.

mengetahui pilihan-pilihan aktor yang dibentuk, atau tidak mungkin mengetahui kalkulasi untung dan ruginya.

Selain itu, kritik terhadap teori mobilisasi sumber daya ini dikarenakan rumitnya relasi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Sebagaimana ditegaskan Hanningan⁴⁶ bahwa hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin sangat rumit, dan kerap disebut dengan “hukum besi oligarki.” Hal ini disebabkan teori mobilisasi sumber daya cenderung berasumsi bahwa tujuan, ideologi dan strategi sangat ditentukan oleh pemimpin ketika anggotanya diperlakukan sebagai sumber daya.

3. Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*)

Teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*), menurut Ben Agger,⁴⁷ menawarkan pandangan teoretis bagi ilmuwan gerakan sosial yang kekurangan perspektif teoretis yang lebih luas, di samping dapat menjelaskan dari mana gerakan ini berasal dan dampak struktural seperti apa yang ditimbulkannya. Dengan mengambil pemikiran Marxis tentang perjuangan kelas dan perspektif non-Marxis tentang gerakan sosial, Habermas yang merupakan salah seorang tokoh *Frankfurt School* ini mempertahankan pandangan Marxis atas aksi sosio-politik transformasional sambil mengubah ortodoksi sayap kiri yang terkait dengan gerakan Marxis tradisional, seperti gerakan masyarakat kulit berwarna, feminis, gay, lesbian, antikolonial, antinuklir, lingkungan dan perdamaian.

⁴⁶Periksa dalam Harry Azhar Azis “Korupsi dan Pembangunan” dalam Musni Umar (ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), 154.

⁴⁷ Lihat detail dalam Ben Agger. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 356.

Teori gerakan sosial baru ini menegaskan bahwa penyebab munculnya gerakan-gerakan baru ini tak dapat dilepaskan dengan teori Karl Marx yang mengatakan bahwa “bangunan bawah,” yakni ekonomi sangat mempengaruhi “bangunan atas” seperti politik, sosial dan budaya. Dengan perkataan lain, cara produksi kehidupan material akan mempengaruhi proses kehidupan politik, sosial dan budaya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaannya, melainkan corak ekonomi yang menentukan kesadaran mereka. Corak ekonomi kapitalisme dan politik liberal memiliki kelemahan seperti adanya jurang yang lebar dalam penguasaan politik dan ekonomi, sehingga adanya realitas orang yang ditindas dan penindas dianggap hal yang wajar dan alamiah.

Teori gerakan sosial baru menekankan peranan agen atau aktor perubahan bukan lagi kaum buruh atau petani, melainkan sangat beragam seperti feminis, ekolog, aktivis perdamaian, aktivis anti-nuklir, aktivis Hak Asasi Manusia dan pengusung otonomi. Para pelopor teori gerakan sosial baru yang dimotori para pemikir yang tergabung di dalam *Frankfurt School* melihat bahwa munculnya Gerakan Sosial Baru dengan agen atau aktor yang berbeda, juga isu-isu yang diusung relatif berbeda dengan gerakan petani atau gerakan buruh.

Yang perlu disadari bahwa aktor dari gerakan sosial baru itu berasal dari basis sosial yang sangat luas dan melampaui kategori sosial seperti gender, pendidikan, dan kelas. Para aktor gerakan sosial baru ini berjuang bukan untuk kepentingan kelas, melainkan berjuang demi kemanusiaan. Aktor gerakan sosial baru umumnya berasal dari kelas menengah.

Claus Offe⁴⁸ mengatakan bahwa apa yang membedakan gerakan sosial baru adalah penolakan mereka pada basis identifikasi diri yang mapan, karena mereka bukan dalam bahasa politik, “kanan” atau “kiri,” “liberal” atau “konservatif,” tidak juga dikenali berdasarkan kelas, gender, suku, umur, lokalitas dan sebagainya. Offe melacak aktor gerakan sosial baru ini dalam kelas menengah baru, khususnya unsur-unsur kelas menengah ini yang bekerja dalam profesi pelayanan kemanusiaan, unsur-unsur kelas menengah lama dan orang-orang yang menempati posisi pinggiran. Dalam kaitan ini dapat dipahami bilamana Cohen⁴⁹ menegaskan bahwa aktor gerakan sosial baru lebih memusatkan perhatiannya pada politik akar rumput dan menciptakan asosiasi-asosiasi demokratis yang horizontal dan langsung berhimpun dalam federasi yang longgar pada level nasional.

Menurut Foweraker,⁵⁰ teori gerakan sosial baru ini tidak dapat dilepaskan dari konstituen, nilai, dan bentuk-bentuk aksi yang diciptakan oleh perubahan struktural di dalam masyarakat modern. Ini berarti gerakan sosial baru adalah gerakan yang merupakan bentuk respon baru terhadap keluhan baru (*new grievances*). Keluhan-keluhan baru dari masyarakat modern ini seperti masalah lingkungan, persenjataan nuklir, hak-hak kaum perempuan dan lain-lain.

Namun, teori gerakan sosial baru ini memiliki sejumlah kelemahan dalam menjelaskan mengapa gerakan sosial semakin menguat. Teori gerakan sosial baru ini hanya mampu menjelaskan bahwa saat ini gerakan sosial yang ada tidak hanya

⁴⁸Lihat lebih lanjut dalam Mansour Fakih, “Tiada Transformasi Sosial Tanpa Gerakan Sosial”, dalam buku *Radikalisme...* 56.

⁴⁹ Lihat lebih lanjut dalam Mansour Fakih, “Tiada Transformasi Sosial Tanpa Gerakan Sosial”, dalam buku *Radikalisme...* 60.

⁵⁰ Periksa lebih lanjut dalam A.Budi Susila dan Gito Haryanto. “Gerakan... 80.

didominasi oleh kekuatan lama seperti buruh dan petani, melainkan telah muncul agen atau aktor baru dengan mengusung isu-isu yang beragam.

Terlepas dari kelemahan teori gerakan sosial baru tersebut di atas, pertanyaannya adalah kenapa gerakan sosial baru ini disebut “baru”? Menurut Tourine,⁵¹ ada tiga hal gerakan sosial baru ini disebut “baru”, yaitu: (1), gerakan sosial baru secara kualitatif berbeda dengan gerakan sosial lama seperti organisasi buruh dan petani yang menaruh perhatian pada keadilan ekonomi dan sosial politik, (2) gerakan sosial baru berkait erat dengan isu sosial, dan (3) gerakan sosial baru terdiri dari kelompok-kelompok perorangan tetapi membentuk unsur gerakan yang lebih besar.

Dengan demikian, ketiga hal yang diungkapkan Tourine tersebut di atas dapat dikatakan sebagai ciri dari gerakan sosial baru. Namun, sebagai perbandingan, Enrique Larana⁵² mengidentifikasi ciri-ciri gerakan sosial baru sebagai berikut: (1) mengatasi struktur kelas; (2) kemajemukan ide dan nilai; (3) memusatkan pada isu budaya dan simbolik yang berkaitan dengan identitas dari pada ekonomi; (4) kaburnya hubungan individu dan ekonomi; (5) keterlibatan segi-segi pribadi dan akrab dengan kehidupan yang lebih manusiawi; (6) mengutamakan semangat anti-kekerasan dan pembangkangan sipil; (7) adanya krisis kredibilitas dan ruang partisipasi; (8) cenderung terfragmentasi dan terdesentralisasi.

⁵¹ Lihat dalam Touraine, A. “Social Movement and Social Change” dalam Orlando Fals Bonda (ed.) *The Challenge of Sosial Change*. (London. Sage 1985), 23-24.

⁵² Periksa dalam Enrique Larana et.al., *New Social Movement: From Identity to Ideology*, (Philadelphia: Temple University Press 1994), 94.

Sementara itu, Escobar dan Alvarez⁵³ menegaskan bahwa ciri utama dari gerakan sosial baru itu adalah gerakan yang menandingi dasar politik dari negara. Gerakan sosial baru tumbuh melalui pelaku kolektif yang terorganisir dan terlibat dalam perjuangan politik atau kultural dalam bentuk aksi yang institusional dan ekstra-institusional.

Menurut Klandermans,⁵⁴ teori gerakan sosial baru ini memandang organisasi gerakan sosial bukanlah sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan eksternal, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Organisasi gerakan sosial merupakan wadah demokratis di masyarakat yang menciptakan identitas-identitas baru melalui aksi sosial otonom. Bagi Melucci,⁵⁵ organisasi gerakan sosial bukanlah instrumen yang sederhana untuk mengubah masyarakat, tetapi merupakan jaringan kelompok-kelompok dan individu-individu yang berpegang pada kultur konfliktual dan sebuah identitas sosial, sedangkan interpretasi mereka dipertentangkan.

4. Teori Proses Politik (*Political Process Theory*)

Foweraker⁵⁶ mencatat bahwa beberapa tahun belakangan para ahli gerakan sosial telah berupaya memperbaiki dan memperluas teori mobilisasi sumber daya atau menerima bentuk-bentuk sintesis antara pendekatan gerakan sosial baru dan pendekatan mobilisasi sumber daya.

⁵³Periksa dalam Haynes Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2000), 24-28.

⁵⁴Lihat lebih detail dalam Klandermans, Bert.. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), 214.

⁵⁵ Lihat Klandermans, Bert. *Protes...*219.

⁵⁶ Periksa dalam Joe Foweraker. *Theorizing Social Movements*. (London – Boulder Colorado: Pluto Press, 1995), 18.

Di satu sisi, literatur Eropa hanya memandang struktur asli gerakan sosial tanpa menganalisis kondisi politik yang mendorong atau menghalangi aksi kolektif. Sedangkan di lain sisi, literatur Amerika Utara menuntut pertanyaan-pertanyaan politis mengenai organisasi dan strategi tanpa menganalisis konteks sosial dan konteks politik suatu negara. Kedua literatur ini ditelaah secara kritis oleh Sidney Tarrow,⁵⁷ kemudian ia menggabungkan problem hubungan aksi kolektif dan politik dari kedua pendekatan itu yang disebutnya dengan istilah “model proses politik.”

Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan penekanan dalam teori mobilisasi sumber daya dan teori proses politik. Sebagaimana dikemukakan Mc Adam dan kawan-kawan,⁵⁸ bahwa teori mobilisasi sumber daya memusatkan perhatian pada peranan sumber daya dan organisasi formal di dalam kemunculan gerakan.

Sedangkan teori proses politik lebih menekankan pentingnya memperluas peluang politik sebagai tujuan dari aksi kolektif. Ini berarti teori proses politik dapat melihat perbedaan yang tegas mengenai lingkungan politik dari gerakan sosial lama yang beroperasi pada masyarakat industri dan lingkungan politik gerakan sosial baru yang beroperasi pada masyarakat pasca-industri.

⁵⁷ Lihat lebih detail dalam Tarrow, Sidney. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, second edition. (United Kingdom: Cambridge University Press. 1998). 145.

⁵⁸ Lihat dalam Mc Adam and John D McCarthy, Meyer N Zald. “Introduction: Opportunities, Mobilizing Structure, and Framing Process – Toward a Synthetic, Comparative Perspective On Social Movement”, dalam *Comparative Perspectives On Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Framing Cultural Framing*, (Cambridge: Cambridge University Press. 1996), 7.

Menurut Muukkonen, teori proses politik (*political process theory*) memperlihatkan betapa pentingnya memahami keadaan struktural mengenai aktivis-aktivis yang potensial maupun dukungan politik atau rintangannya. Gagasan ini berakar dari pemikiran Ralf Dahrendorf, yang dikenal sebagai revisionis Marxis dengan karyanya berjudul *Class and Class Conflict in Industrial Society* yang terbit pada tahun 1959.

Teori Proses politik tersebut, menurut Della Porta dan Mario Diani,⁵⁹ dapat menjelaskan secara sistematis mengenai lingkungan dan institusi politik dimana gerakan sosial beroperasi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara lembaga aktor politik dan gerakan protes. Di dalam tatanan politik yang ada, gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan aktor yang melakukan konsolidasi guna menempatkan posisi gerakannya yang tepat dalam tatanan politik yang ada. Konsep yang sudah berhasil dirumuskan dengan baik mengenai lingkungan eksternal, hubungan antara pembangunan dan gerakan sosial adalah konsep struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*).

Charles Tilly dan Sidney Tarrow⁶⁰ telah mengembangkan konsep struktur kesempatan politik tersebut menjadi konsep yang penting dalam kajian gerakan sosial. Gagasan pokok dari konsep struktur kesempatan politik adalah membawa aspek-aspek perubahan ke dalam struktur. Dalam kaitan dengan konsep struktur kesempatan politik ini, Peter Eisinger⁶¹ menggunakannya untuk melakukan

⁵⁹ Lihat dalam Della Porta, Donatella & Mario Diani. *Social Movements An Introduction*, (United Kingdom: Blackwell Publisher Inc. 1988), 9.

⁶⁰ Lihat dalam Charles Tilly, Doug McAdam & Tarrow. *The Dynamic of Contentious*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2002), 34.

⁶¹ Lihat Della Porta, Donatella & Mario Diani. 1988. *Social Movements...15*.

perbandingan mengenai hasil dari berbagai gerakan protes yang berbeda-beda di kota-kota Amerika Serikat.

Dalam melakukan perbandingan mengenai gerakan protes, Peter Eisinger memusatkan perhatian mengenai tingkat keterbukaan sistem politik lokal. Ini berarti konsep *political opportunity structure* dapat digunakan untuk melihat gerakan sosial. Jika keterbukaan sistem politik lokal itu besar maka gerakan sosial akan tumbuh dengan cepat, juga membuka peluang untuk meraih keberhasilan dari tujuan gerakan sosial. Sebaliknya, bilamana sistem politik lokal tertutup maka gerakan sosial akan sulit tumbuh dan berkembang. Sistem politik yang tidak mendukung, tentu saja, akan mempersulit gerakan sosial mencapai tujuannya. Dengan perkataan lain, gerakan sosial tidak akan berkembang atau akan mengalami represi dari negara yang mengembangkan politik otoritarianisme. Sebaliknya, gerakan sosial akan berkembang di bawah negara dengan iklim politik yang demokratis.

Dalam konteks gerakan kontemporer, seperti gerakan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan kaum gay, dan lain-lain, tumbuh dan berkembang dalam konteks politik tertentu baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Sebagaimana dikatakan Della Porta dan Mario Diani, pendukung teori proses politik telah memberikan perhatian terhadap fakta gerakan kontemporer (dari kelompok kaum muda, perempuan, homoseksual atau kelompok etnik yang minoritas) yang telah berkembang dalam konteks politik dan dalam suasana inovasi kultural dalam waktu bersamaan.

G. Gerakan Sosial Islam

Gerakan sosial keagamaan telah lama muncul di Indonesia. Banyak kasus-perseteruan keagamaan yang muncul dipicu oleh faktor-faktor vertikal maupun horizontal. Faktor-faktor vertikal terjadi ketika gerakan sosial yang biasanya terwadahi dalam *civil society* menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, atau sebuah undang-undang karena dianggap tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai keagamaan tertentu, khususnya Islam. Sementara gerakan keagamaan secara horizontal adalah sebuah perseteruan yang terjadi di antara kelompok-kelompok dalam sebuah agama tertentu, maupun perseteruan kelompok-kelompok antar agama yang ada.

Quintan Wictorowics⁶² menjelaskan, bahwa berbagai macam perseteruan maupun gerakan keagamaan yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal sebagai “Aktivisme Islam”. Menurutnya, definisi aktivisme Islam adalah lebih luas dan berusaha untuk seinklusif mungkin. Dalam hal ini, definisi itu mencakup beragam perseteruan yang seringkali muncul atas nama Islam, termasuk gerakan-gerakan dakwah, kelompok-kelompok teroris, tindakan kolektif yang bersumber dari simbol dan identitas Islam, gerakan-gerakan politik yang berusaha untuk mendirikan sebuah Negara Islam, dan kelompok-kelompok berorientasi ke dalam yang mengusung spiritualitas Islam melalui usaha-usaha kolektif.

Dalam sejarah, terjadi berbagai peristiwa perseteruan dalam masyarakat dunia yang menggunakan agama atau bernuansa agama seperti serangkaian bom bunuh diri di Israel yang menewaskan warga sipil biasa, teror gas beracun Aum

⁶² Lihat lebih lanjut dalam pendahuluan oleh Quintan Wictorowics, *Gerakan Sosial Islam, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. (Jakarta: Gading Publishing dan Paramadina, 2012), 48.

Shinrikyo pimpinan Asahara Shoko di Jepang (1990-an), kekerasan rezim Taliban di Afghanistan atas nama ketaatan terhadap syariat Islam sebagai hukum negara, kekerasan kelompok ekstremis Yahudi Israel, pimpinan Rabi Meir Kahane atas warga Arab Palestina, bunuh diri massal para pengikut aliran *Peoples Temple* pimpinan Jim Jones di Guyana (1970-an), dan pada gerakan David Koresh di Texas (1990-an). Puncaknya tragedi WTC 11 September di Amerika yang menewaskan ribuan manusia yang tidak tahu apa-apa.⁶³

Beberapa tahun belakangan ini termasuk juga di Indonesia, isu radikalisme agama sangat menguat dan mengguncangkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Misalnya, Peristiwa bom Bali menewaskan ratusan nyawa, ledakan bom di Hotel JW Marriot, Jakarta dan tempat-tempat lainnya. Kelompok agama fundamental berjuang sekuat tenaga dan dengan segala cara, memperjuangkan visi dan misi mereka, tanpa peduli akan kenyataan dalam masyarakat bahwa bangsa ini adalah pluralis.

Kasus perseteruan yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2011 yang paling tinggi adalah pelanggaran atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelanggaran rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi

⁶³ Sindhunata dalam Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana* Pengantar Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*, (Bandung: Mizan. 2003), 13-21.

keyakinan 4 kasus (4%). Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan perseteruan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 92 kasus.⁶⁴

Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa fakta-fakta perseteruan terkait kebebasan beragama selama tahun 2011 sebagaimana digambarkan di atas membuktikan bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias mayoritas dan selalu menguntungkan mayoritas. Bahkan dalam implementasi di lapangan, penggunaan alasan ketertiban umum dan meresahkan masyarakat hanya diasosiasikan untuk kepentingan mayoritas guna membatasi kelompok minoritas. Penggunaan otoritas negara seperti kekerasan juga hanya diperuntukkan untuk melayani kelompok mayoritas.⁶⁵

Selain itu temuan kasus-kasus perseteruan terkait kebebasan beragama tahun 2012 menunjukkan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama paling tinggi. Pasca tragedi Cikeusik Pandeglang Banten, intensitas pelanggaran kebebasan beragama kelompok ini justru semakin meningkat. Di berbagai daerah terdapat aturan lokal yang membatasi aktifitas mereka, terjadi pemaksaan untuk keluar dari Ahmadiyah, termasuk dengan digelarnya “operasi sajadah” di berbagai daerah di Jawa Barat. Keluarnya berbagai peraturan kepala daerah terkait pembatasan aktivitas

⁶⁴ The Wahid Institute, “*Lampu Merah Kebebasan Beragama*”, Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 1.

⁶⁵ Lebih detail lihat dalam, The Wahid Institute, “*Lampu Merah...* 2.

Ahmadiyah ini telah mendorong sikap masyarakat lebih agresif melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah.⁶⁶

Untuk menjelaskan lebih jauh mengapa agama demikian garang dan kejam, tidak dapat serta merta agama dituduh sebagai biang masalah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas bergantung pada bagaimana orang memahami hakikat agama itu sendiri. Agama, dalam kaitan ini, harus dipahami dalam konteks relasinya dengan kehidupan riil manusia. Naif jika agama diposisikan bebas dari segenap kenyataan hidup tersebut. Agama, dalam konteks di atas merupakan kekuatan penting bagi kehidupan manusia. Karena itulah agama justru harus ditempatkan secara proporsional dalam konteksnya.⁶⁷

Institusi negara tercatat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama paling banyak. Polisi menempati posisi pertama yakni 32 kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah sebanyak 28 kali. Pelaku pelanggaran kebebasan beragama lainnya adalah tentara (16), Satuan Polisi Pamong Praja (10), Pemerintah Provinsi (8) serta Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (8).

H. Pilihan Rasional dan *Framing* Dalam Gerakan Sosial Islam

Kajian tentang gerakan Islam sebelumnya lebih menekankan bahwa keyakinanlah yang menentukan perilaku. Islam sebagai suatu sistem kepercayaan dilihat sebagai satu-satunya daya dorong yang kuat untuk melancarkan kekerasan. Namun, kajian terkini tentang gerakan Islam mencoba melihat dari sisi “model aktor rasional” yang longgar dari pada melihat aktivis gerakan Islam hanya

⁶⁶ Lebih detail lihat dalam, The Wahid Institute, “*Lampu Merah...* 5.

⁶⁷ Lebih detail lihat dalam, Sindhunata dalam Charles Kimball, *Kala Agama...*27.

dipandu ketaatan pada suatu ideologi yang kaku. Dengan perspektif ini, aktivis Islam dipandu dengan penilaian taktis dan strategis dari biaya dan risiko. Pilihan pada bentuk gerakan didasarkan pada penilaian yang sadar, dengan memperhitungkan peluang dan hambatan, sehingga dapat diprediksi apakah gerakan itu akan berhasil atau gagal.

Akan tetapi, meski peran ideologi tidak terlalu ditekankan sebagai variabel kausal dalam kajian gerakan Islam, teori gerakan sosial tidak menolak peran gagasan sama sekali. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana ide-ide secara sosial diciptakan, diatur, dan disebarluaskan. Dengan kata lain, penekanannya pada proses pembangunan wacana dan paket-paket ideasional yang dihasilkan.

Suatu gerakan harus membingkai (*frame*) argumennya untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi. Gerakan Islam lokal Madura misalnya, mereka menegaskan otoritas dirinya sebagai kelompok Sunni yang memegang teguh prinsip Islam yang benar, dan menyerang lawannya sebagai kelompok aliran sesat yang berupa Syi'ah. Terkadang, gerakan Islam melakukan *framing* tidak selalu menggunakan isu-isu Islam, tetapi bercampur dengan isu yang lebih luas, khususnya untuk mendapat dukungan dari mereka yang mengharapkan terjadi perubahan dan transformasi sosial.⁶⁸

⁶⁸ Lihat lebih lanjut dalam, Charles Kurzman, "A dynamic View Resources: Evidence from Iranian Revolution," *Research in Social Movements, Conflict and Change*, (London: Routledge 1994), 53-84.

Menurut Salwa,⁶⁹ gerakan-gerakan Islam sangat terlibat dalam produksi makna dan proses-proses pemingkanaan. Seperti banyak “gerakan sosial baru” yang dipicu oleh isu-isu tentang identitas, budaya, dan pasca materialisme (ketimbang isu-isu kelas, ekonomi, dan kepentingan politik sempit). Gerakan-gerakan Islam terlibat dalam berbagai pertarungan makna dan nilai-nilai. Meskipun banyak penelitian terfokus pada gerakan-gerakan terpolitisasi yang berusaha mendirikan negara Islam, imperatif utama dari gerakan-gerakan Islam adalah keinginan untuk membentuk sebuah masyarakat yang dikendalikan dan dipandu oleh syariah.

Kontrol dan rekonstruksi lembaga-lembaga negara mungkin merupakan suatu sarana efektif untuk mencapai transformasi ini, namun ini hanya salah satu dari banyak jalan untuk perubahan. Dengan kata lain, negara adalah sebuah sarana untuk produksi makna, bukan tujuan akhir. Dalam kenyataan, sebagian besar perjuangan Islam dijalankan melalui masyarakat dan wacana budaya ketimbang melalui lembaga-lembaga negara atau badan-badan pembuat keputusan pemerintah. Usaha-usaha tersebut menantang kode-kode budaya dominan dan menciptakan jaringan-jaringan makna bersama tentang fungsi yang tepat dari masyarakat, kelompok dan individu.

Namun, gerakan-gerakan sosial tumbuh di dalam wilayah di mana beragam aktor seringkali bersaing untuk memperoleh hegemoni dalam pemingkanaan. Berbagai perselisihan dan persaingan pemingkanaan makna

⁶⁹ Lihat lebih detail dalam Salwa Ismail, “*The Popular Movement Dimensionsof contemporary Militant Islamism: Socio-spatial Determinants in the Cairo Urban Setting*”, *Comparatives Studies in History and Society*, (Jakarta: Gading, 2 April 2000), 363-393.

mendorong tekanan-tekanan persaingan ketika berbagai macam kelompok memproduksi dan menyebarluaskan skema-skema penafsiran. Persaingan tersebut terjadi bukan hanya antara sebuah gerakan dan lawan-lawannya, melainkan juga di dalam gerakan itu sendiri.

Berbagai friksi di dalam sebuah gerakan (seperti friksi antara kalangan garis keras dan garis lunak, konservatif dan liberal, muda dan tua, ideologi dan pragmatis) bisa memunculkan perselisihan-perselisihan internal dalam pembingkaiian ketika tiap-tiap faksi berusaha untuk menegaskan bingkainya sendiri untuk diadopsi di seluruh gerakan.

Pembingkaiian prognostik khususnya, cenderung menghasilkan berbagai macam perselisihan pembingkaiian dalam gerakan. Meskipun gerakan-gerakan seringkali memiliki suatu pemahaman bersama tentang tanggung jawab bagi sebuah persoalan, namun kurang ada kohesi menyangkut strategi dan taktik.

Menurut Snow dan Benford,⁷⁰ selain persaingan-persaingan pembingkaiian di dalam sebuah gerakan, kelompok-kelompok gerakan sosial juga seringkali bersaing dengan “bingkai-bingkai resmi.” Karena rezim-rezim di seluruh dunia muslim bersandar pada Islam dalam berbagai macam cara untuk mendapatkan legitimasi, mereka aktif terlibat dalam apa yang disebut Dale Eickelman dan James Piscatori⁷¹ sebagai “politik muslim” yaitu; persaingan dan pertarungan untuk

⁷⁰ Periksa dalam, Snow, David A., dan Robert D. Benford. “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization,” dalam Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi, and Sydney Tarrow (ed) *From Structure to Action: Comparing Movement Participation across Cultures, International Social Movements Research*, Jilid I, (Greenwich Conn: JAI Press, 1988), 197-218.

⁷¹ Lihat lebih detail dalam, Dale E. Eickelman, dan James Piscatori, 1996. *Muslim Politics*; (Princeton NJ: Princeton University Press), 83.

memperebutkan penafsiran atas simbol dan kontrol atas berbagai lembaga, baik formal maupun non informal, yang menopang mereka.

Dalam usaha untuk memelihara sumber legitimasi ini, rezim-rezim mengartikulasikan kerangka-kerangka yang tidak berbahaya yang mendukung kepentingan dan kekuasaan rezim tersebut. Bingkai-bingkai ini tidak menyerukan perubahan-perubahan besar masyarakat atau negara, melainkan lebih menekankan kesalehan individu dan menyoroti penyelamatan pribadi, dan dengan demikian mendukung varian Islam yang secara politik tidak mengancam. Pada saat yang sama, rezim-rezim juga berusaha untuk membatasi sumber-sumber daya kelembagaan dan ruang publik yang tersedia bagi penyebaran bingkai-bingkai alternatif, yang dapat membahayakan legitimasi rezim tersebut.⁷²

Seperti halnya gerakan-gerakan sosial yang lain, sukses gerakan Islam sampai tingkat tertentu disebabkan oleh reputasi orang-orang yang mengartikulasikan bingkai dan penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang dikenal publik yang merasuk dalam pengalaman budaya dan memori kolektif. Meskipun banyak muslim masih mengikuti para ulama publik, para mufti, dan para Imam (pemimpin ibadah), “Islam resmi” telah kehilangan kredibilitas di kalangan komunitas-komunitas yang tidak puas dan termarginalkan.

Kelompok-kelompok ini seringkali menoleh pada Islam “populer” dan para pemimpin terkemuka komunitas, termasuk pada aktivis Islam. Untuk memaksimalkan akses ke penduduk yang tidak puas ini, kalangan Islamis dalam

⁷² Lihat lebih detail dalam, Snow, David A., dan Robert D. Benford, *Ideology, Frame Resonance*, (Greenwich Conn: JAI Press, 1988), 180.

banyak kasus mencampurkan tema-tema keagamaan dengan elemen-elemen non keagamaan untuk mendapatkan dukungan luas di kalangan mereka yang sekedar menginginkan perubahan dari status quo ketimbang suatu perubahan Islami.

Penggunaan pembingkai oleh kelompok-kelompok Islam tersebut mencerminkan komponen-komponen budaya dan ideasional dari politik persetujuan; dan meskipun bingkai semata tidak dapat menjelaskan setiap dimensi tindakan kolektif, namun bingkai merupakan sarana penafsiran penting yang menerjemahkan berbagai ketidakpuasan dan kesempatan yang ada menjadi mobilisasi sumber daya dan aktivisme gerakan.

I. Islam Lokal Madura

Madura adalah salah satu dari contoh cerminan etnisitas di Indonesia yang sangat beragam. Sejarah Madura yang sangat panjang semenjak pendudukannya oleh pemerintahan kolonial hingga saat ini memberikan ciri tersendiri kepada Masyarakat Madura.

Menurut De Jonge,⁷³ memang dapat dibenarkan jika Madura mendapat pengaruh yang kuat dari Jawa. Sepanjang sejarahnya, Madura telah merupakan bagian dari kerajaan Hindu dan kekuasaan Islam yang pusatnya di Jawa, misalnya Singosari, Majapahit, Demak, Kudus, Gresik, Surabaya, dan Mataram. Raja-raja Madura pada zaman dahulu mempunyai hubungan keluarga dengan bangsawan

⁷³ Lihat lebih lanjut dalam, Huub De Jonge, (ed). *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*. (Jakarta: Rajawali Press. 1989a), 110, Bandingkan juga dengan Huub De Jonge, "Stereotypes of Madurese" Dalam Van Dijk K, De Jonge, H. dan Touwn –Bouwsmas, E (eds.). *Across Madura Strait: The Dynamic of an Insular Society*. (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde (KITLV) Press. 1995), 88.

Jawa dan meniru-niru cara hidup kraton Jawa. Walaupun keadaannya demikian, kebudayaan Madura mempunyai ciri khasnya sendiri dan telah melalui proses perkembangan tersendiri.

Penetrasi yang kuat akan agama Islam dalam masyarakat Madura yang sedikit banyak merubah pandangan masyarakat Madura terhadap hidupnya. Dari mulai masalah pendidikan, upacara-upacara keagamaan, sampai orientasi politiknya. Agama Islam pada masa perkembangannya juga membentuk perekonomian rakyat Madura dan menimbulkan budaya merantau dan berpindah tempat.

1. Islam dan Politik Lokal: Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura

Madura merupakan tanah yang subur untuk mempelajari gerakan-gerakan politik Islam karena beberapa alasan. Pertama, Madura merupakan satu diantara banyak tempat dimana penetrasi kapitalis pada abad kesembilan belas telah mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Para penguasa Madura sudah terbiasa menyewakan *apanage* mereka kepada lintah darat Cina. Kedua, Madura menderita akibat sisa-sisa dari suatu sistem stratifikasi sosial yang ketat telah memusatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa semata-mata dalam tangan golongan yang memerintah saja. Ketiga, Madura terkenal karena rakyatnya yang taat pada agama, sedemikian sehingga ketaatan ini sedikit banyak mencerminkan perilaku keagamaan umat Islam di Indonesia. Keempat, kerumitan struktur sosial

Madura mencerminkan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan yang lainnya.⁷⁴

SI memperkenalkan rakyat Madura pada dunia modern. Dasawarsa setelah *oreng kenek* dibebaskan dari hubungan ketergantungan mereka pada kaum bangsawan berlalu tanpa perubahan berarti, dan SI-lah yang menjadikan kebebasan itu terwujud. Kepemimpinan SI menyediakan sebuah alternatif baru untuk hubungan vertikal antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan.

Persekutuan antara cendekiawan kota dan pemimpin agama di pedesaan menandai suatu fase baru dalam sejarah politik Indonesia. SI menarik massa baik dari perkotaan maupun pedesaan. Belum pernah ada sebelumnya mobilisasi massa begitu berhasil. Madura secara tradisional bukan merupakan tanah yang subur untuk mobilisasi umum.⁷⁵

Terutama karena alasan-alasan ekologis seperti tersebut di atas, Madura tidak pernah bisa menjadi tanah subur untuk tindakan kolektif. Sebuah laporan pemerintah pada tahun 1906 menyimpulkan bahwa untuk orang Madura, mengorganisir suatu gerakan sosial adalah suatu kemustahilan. Ekologi tegalan tidak memerlukan sistem pengairan komunal yang dapat merupakan jalan bagi munculnya perasaan kolektif.⁷⁶

Jadi satu-satunya sarana komunikasi yang efektif ialah melalui agama. Sembahyang Jum'at yang dilakukan seminggu sekali di mesjid desa,

⁷⁴ Lebih detail lihat dalam Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris 1850 – 1940*. (Yogyakarta: Mata Bangsa Press, 2002), 222.

⁷⁵ Lihat dalam Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan...* 225.

⁷⁶ Lihat dalam Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan...* 233.

menyediakan suatu saluran, walaupun khutbah pada saat itu disampaikan dalam bahasa dan berkaitan dengan masalah keagamaan murni.

Meskipun demikian, kyai rasanya bukan pemimpin yang cocok untuk gerakan sosial modern. Gaya kepemimpinan pribadi kyai yang kharismatis tidak dilengkapi dengan keterampilan yang perlu untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan yang berisi ideologi, struktur dan tujuan tertentu. Jenis kepemimpinan agama yang lainlah, haji, yang memberikan alternatif. Haji kebanyakan adalah pedagang, dan dengan demikian mereka merupakan bagian masyarakat yang paling mobil.⁷⁷

Haji Syadzili, pendiri dan pemimpin gerakan SI di Madura, adalah seorang pedagang beras yang seringkali bepergian ke Surabaya. Kenyataan bahwa setiap haji mampu untuk bepergian ke Mekkah, yang ongkosnya lebih dari 500 gulden pada pergantian abad ini, menunjukkan bahwa mereka kaya sekali.

Dipilihnya Haji Syadzili dan kota Sampang untuk pendirian SI yang pertama di Madura memerlukan sedikit penjelasan. Mas Gondosasmito, yang setelah kembali dari mekah disebut Haji Syadzili, adalah seorang mantri guru, kepala sekolah, pada sekolah umum pemerintah di kota Sampang sebelum pergi naik haji pada usia 25 pada tahun 1911.

Mungkin, karena memperkirakan akan adanya konflik-konflik tertentu menjadi haji dan sekaligus seorang kepala sekolah, dia mengundurkan, atau kalau tidak begitu mungkin dia telah diberhentikan dari pekerjaan mengajarnya. Setelah

⁷⁷ Periksa lebih detail dalam penelitian Soemanto R.B. *Suatu Telaah Deskriptif Tentang Perubahan Sosial di Masyarakat Desa Banyuwangi, Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan*. Dalam *Madura V*, Kumpulan Makalah, Loka Karya Penelitian Sosial Budaya. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981), 216.

kawin dengan seorang pedagang wanita yang berhasil, dia mengadu nasibnya dalam perdagangan beras. Di Surabaya, pusat perdagangan Jawa Timur, dia berhubungan dengan Cokroaminoto setelah markas besar SI dipindahkan ke kota itu. Dia mengunjungi Cokroaminoto dan beberapa lama bersama dia mempelajari ideology dan organisasi gerakan SI. Sementara itu, kota Sampang agaknya telah dipersiapkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan Syadzili.

Perkembangan SI berhasil dengan baik. Syadzili bepergian sampai sejauh pulau Sapudi di timur untuk menjual saham sebuah toko koperasi SI di Surabaya. Pemerintah menjadi panik melihat penyebaran SI di Surabaya. Banyak pegawai pemerintah bergabung pada gerakan ini dan mengangkat sumpah. Pemerintah khawatir bahwa SI akan menjadi suatu gerakan masyarakat rahasia, yang menarik anggota dan mengharuskan mereka mengangkat sumpah setia kepada SI. Pejabat-pejabat pemerintah setempat di kota Pamekasan segera memberikan reaksi dengan melarang sumpah-sumpah rahasia dan meminta bantuan pejabat-pejabat keagamaan dalam pemerintahan untuk melawan pengaruh SI.

Akan tetapi, baik larangan tersebut maupun pejabat keagamaan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan gerakan ini. Pemerintah terpaksa menyerah pada tuntutan rakyat banyak. Pada tanggal 31 Desember 1913 permohonan untuk pengakuan status resmi SI Sampang dan Sumenep diserahkan kepada pemerintah, dan tahun berikutnya datang permohonan dari Pamekasan (9 Februari 1914), dari Duko (25 Februari), dari Bangkalan (2 April). Tidak ada alasan bagi pemerintah

untuk menolak status resmi tersebut, dan pemerintah akhirnya terpaksa mengabulkan permohonan-permohonan tersebut.⁷⁸

Walaupun terdapat banyak pemimpin priyayi, tokoh-tokoh SI yang menonjol di Madura pada umumnya adalah *oreng kenek*, dan sementara terdapat cukup banyak kyai, kesadaran keagamaan haji adalah dominan. Dengan kata lain, SI di Madura adalah sebuah gerakan *oreng kenek* atau *wong cilik* dan sekaligus sebuah gerakan umat. Partisipasi *oreng kenek* merupakan suatu tanda kesadaran baru. Setelah bebas dari hubungan kepatuhan kepada kaum bangsawan yang telah berjalan lama, mereka muncul sebagai suatu kelas sosial baru dengan kepentingan yang sama. Banyak peristiwa yang menunjukkan ketidakpuasan dan permusuhan rakyat terhadap kaum bangsawan yang menurun wibawanya terjadi selama periode yang sedang dipelajari ini.⁷⁹

Menurut Kuntowijoyo,⁸⁰ pentingnya gerakan SI di Madura untuk memahami gerakan Islam secara umum ialah bahwa sejarah lokal dan awal SI merupakan contoh hakikat dan proses gerakan Islam pada umumnya. Gerakan *oreng kenek* atau *wong cilik* dengan pimpinan yang melintasi batas golongan – cendekiawan, priyayi dan pedagang – dan pimpinan yang berasal baik dari latar belakang perkotaan maupun pedesaan, telah merupakan ciri gerakan Islam Indonesia.

Gerakan *wong cilik* ini seringkali terpaksa untuk bersifat lebih khusus dan untuk membatasi horizon politiknya. Munculnya solidaritas umat yang berbeda

⁷⁸ Periksa lebih detail dalam penelitian Soemanto R.B.. *Suatu Telaah Deskriptif...* 235-241.

⁷⁹ Lihat detail dalam Soekardjo B.W. *et.al, Perubahan Orientasi Nilai Budaya Orang Madura di Bangkalan Terhadap Pembangunan*, Laporan Penelitian, (Jember : Universitas Jember. 1996), 22.

⁸⁰ Lihat Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial....* 245.

atau sering bertentangan dengan gerakan nasionalis lainnya adalah akibat proses sejarah yang demikian itu. Dibentuknya komite tentara kanjeng Nabi Muhammad pada tahun 1918 adalah hanya satu kasus di antara banyak keharusan sejarah.

Kemunduran SI di Madura menandai suatu era sejarah baru dalam politik Madura. Kurangnya keterpaduan dan integrasi SI kemudian diganti oleh Nahdlatul Ulama, dimana lebih banyak pemimpin desa dan *wong cilik* tampil ke depan dalam kehidupan politik. Masa magang yang lama dari kyai desa dalam tubuh SI menghasilkan kematangan mereka. Tetapi kemunduran kepemimpinan Islam kota mempunyai akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi Madura. Kemudian diakui bahwa relatif lambatnya proses modernisasi di Madura adalah disebabkan oleh kuatnya pimpinan desa dalam gerakan Islam. Pimpinan intelektual kota, seperti pimpinan Muhammadiyah dan gerakan sosial lainnya membatasi kegiatan mereka pada daerah perkotaan saja. Desa diserahkan pada pemimpin-pemimpin desa, yaitu kyai.

Implikasi yang lebih luas dari SI di Madura ialah bahwa mobilisasi massa Islam selalu disalurkan lewat daya tarik pada perasaan nasionalis, *wong cilik* dan ummat. Pada permulaannya, SI lebih banyak mewakili perasaan-perasaan nasionalis dan *wong cilik*, tetapi kemudian terpaksa mewakili ummat, posisi yang dipegang oleh gerakan-gerakan Islam saat ini. Kebangkitan kembali Islam dalam politik Indonesia dapat terjadi jika gerakan-gerakan Islam yang sekarang mempertimbangkan kembali untuk mewakili perasaan-perasaan nasionalistis dan *wong cilik* (dan persoalan sosial ekonomi yang menyertainya) sebagaimana telah dilakukan oleh SI pada tahap-tahap awal keberadaannya. Kalau gerakan Islam

dapat melepaskan diri dari definisi sempit dari umat, suatu daya tarik yang lebih luas pada mobilisasi massa dapat diharapkan.

2. Islam dan Budaya Lokal Madura

Masyarakat Madura adalah Islam. Pemandangan desa-desa mewujudkan hubungan yang erat antara agama dan kehidupan sehari-hari. Hampir semua rumah terutama rumah-rumah di Sumenep, mempunyai sebuah langgar. Di satu desa terdapat sekurang-kurangnya satu *mesigit* (mesjid) umum. Di desa kehidupan keagamaan diatur oleh masyarakat sendiri. Di sini kyai memainkan peranan yang penting baik dalam pendidikan agama maupun peristiwa-peristiwa keagamaan pada umumnya. Pejabat keagamaan tingkat desa, disebut modin, hanya mengurus masalah yang kaitannya dengan hukum seperti pendaftaran kelahiran (seringkali mencakup vaksinasi anak-anak maupun orang dewasa), perkawinan, perceraian, dan kematian.⁸¹

Kehidupan keagamaan berakar kuat dalam adat orang Madura. Menurut Apriono,⁸² Sepanjang tahun penuh dengan selamatan untuk mengenang keluarga yang telah meninggal dunia, dilaksanakan pada hari kamis malam. Pesta-pesta bulanan atau selamatan dilaksanakan untuk mengenang pendiri mazhab Qadiriyyah Sufi, Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Terdapat banyak upacara lain sepanjang tahun. *Tajin Sora*, sebuah selamatan bubur dan ayam, dilaksanakan

⁸¹ Lebih lanjut periksa dalam Susetyo Darnawi, *Observasi partisipan, Pengalaman di Daerah Banmgkalan*, dalam Madura V. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Kumpulan Makalah, Lokakarya, Penelitian Sosial Budaya Madura. Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi. 1981), 188.

⁸²Lihat lebih detail dalam Markus Apriono, *Pertimbangan Status Sosial Dalam Sumbang Menyumbang di Madura*. Seminar Hasil Penelitian Bidang Kajian Madura, (Jember: Universitas Jember. 199), 33.

pada bulan Sora atau Muharram, bulan pertama tahun Islam. Selamatan ini dilaksanakan untuk mengenang Hussein, cucu Nabi.

Bulan berikutnya, Safar, sebuah sedekah lain akan dilaksanakan untuk mengenang Sayid Abubakar yang telah memenangkan peperangan melawan Dajjal, Raja Iblis. Pada bulan Rabiul-akhir dilaksanakan sedekah *arasol*. Pada tanggal 27 Rajab, ada selamatan untuk mikraj Nabi Muhammad SAW. Dalam bulan Sya'ban orang-orang desa mengadakan upacara yang berlangsung sesuai Maghrib sampai habis Isya sebelum fajar. Sambil berjalan sepanjang pantai atau daerah pinggiran kota, mereka mengucapkan doa-doa tertentu, meminta kesehatan, umur panjang, dan kemakmuran. Bulan puasa adalah bulan untuk beribadah berpuasa. Pada tanggal 21 sampai 29 ada sedekah amal iman. Hari pertama bulan Syawal adalah hari besar, pesta ketupat merayakan berakhirnya minggu puasa sunat. Akhirnya dalam bulan Zulhijjah, di laksanakan perayaan pesta haj dan disebut sedekah *telasan haji*.

Menurut Rahman,⁸³ kehidupan sehari-hari anak-anak juga penuh dengan suasana keagamaan. Sebelum tidur anak-anak membaca dua kalimat syahadat. Tentu saja, siklus kehidupan, kelahiran perkawinan dan kematian, penuh dengan upacara keagamaan. Para santri suka sekali hadra, atau main gendang dan menyanyi. Singkatnya, agama memainkan suatu peranan yang penting dalam sosialisasi anak-anak dan kehidupan sehari-hari orang pada umumnya. Ada beberapa kegiatan yang lebih bersifat duniawi, seperti *mele'an* atau tidak tidur

⁸³ Lihat dalam Rahman, Bustami. *Karakter Orang Madura di Surabaya, Beberapa Pikiran Mengenai Latar belakang dan Perkembangannya*. (Jember: Pusat-pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Jember. 1989), 34. Bandingkan juga dengan Abdurrachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, cetakan ketiga, (Sumenep: The Sun. 1988), 121.

semalaman suntuk sambil membaca cerita-cerita kesusasteraan Jawa lama. Bahkan di beberapa tempat tari sosial Jawa, tayub, menjadi bagian dari budaya Madura.⁸⁴

Penting juga untuk diperhatikan bagaimana kehidupan keagamaan diturunkan dari generasi ke generasi. Pendidikan agama memenuhi kegiatan sehari-hari baik tua maupun yang muda. Lembaga pendidikan yang terendah adalah sekolah-sekolah langgar yang merupakan milik pribadi guru-guru agama. Pendidikan langgar dasar memperkenalkan anak-anak pada pembacaan Quran, mulai dengan pengetahuan sederhana mengenai huruf Arab (alif-alifan), bergerak maju ke turutan (bab-bab yang pendek) dan pembacaan seluruh Al-Quran. Untuk pelajaran lebih lanjut murid pergi ke pesantren dimana diajarkan kitab atau buku-buku keagamaan. Akan tetapi, karena kebanyakan santri menjadi dewasa pada akhir pendidikan agama mereka dan tenaga mereka diperlukan oleh orang tua mereka, banyak murid mengakhiri pelajaran mereka setelah khatam atau tamat ngaji (menyelesaikan qur'an di sekolah langgar).⁸⁵

Orang Madura merupakan penganut agama Islam yang taat. Dalam masalah agama mereka lebih monolit dibandingkan dengan orang Jawa. Semua orang Madura adalah santri atau paling tidak menurut anggapan mereka sendiri. Untuk memahami arti agama di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terdapat tiga aspek

⁸⁴ Periksa dalam Kusuma, Maulana Surya. *Sopan, Hormat dan Islam: Ciri-ciri Orang Madura*, (Jember: Pusat-pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Jember. 1992), 19.

⁸⁵ Periksa dalam Kusuma, Maulana Surya. *Sopan, Hormat... 22*.

yang perlu diperhatikan, yaitu perspektif tujuan hidup,⁸⁶ praktek agama sehari-hari dan pendidikan.⁸⁷

Orang Madura umumnya sulit membedakan antara Islam dan (kebudayaan) Madura. Hal ini tampak pada praktek kehidupan mereka sehari-hari yang tidak bisa lepas dari dimensi agama Islam. Selain shalat lima waktu, orang-orang Madura melaksanakan pula kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan peringatan hari-hari penting agama Islam. Misalnya, selama bula Asyuro, mereka membuat selamatan jenang suro, selama bulan Safar diadakanlah selamatan jenang sapor, di bulan Maulud mereka memperingati dengan selamatan Mauludan. Di bulan Ramadhan, selain mereka menunaikan ibadah puasa juga

⁸⁶ Untuk memahami persepsi tujuan hidup orang Madura bisa dijelaskan dengan penggambaran kehidupan seseorang bernama Syamsuri. Syamsuri adalah seorang pedagang di suatu pasar di kecamatan Lumajang. Sebelum dia datang ke Lumajang, di Madura dia hidup dari sepetak kecil tanah pertanian. Karena dengan tanah pertanian itu dia tidak dapat menghidupi keluarganya secara memadai maka dia mencari pekerjaan ke Jawa. Dia memutuskan untuk berdiam di Lumajang. Pekerjaan sehari-hari dia adalah *mracang* (menjual kebutuhan dapur bagi ibu-ibu rumah tangga) di pasar.

Sehabis bekerja ia selalu tidak lupa melaksanakan shalat lima waktu, termasuk shalat Jum'at. Hasil kerjanya dikumpulkan dengan baik dengan cara menyewa tanah pertanian. Dengan demikian, selain berjualan di pasar keluarga ini juga melakukan aktivitas pertanian. Meskipun demikian, mereka tetap bnerhemat. Apa yang mereka dapatkan, baik dari hasil penjualan di pasar maupun dari hasil pertaniannya, sedikit demi sedikit dikumpulkan sehingga akhirnya mereka bisa membeli beberapa petak sawah.

Setelah usahanya berhasil, berkat ketekunanya, Syamsuri sempat menunaikan ibadah haji ke Mekkah bersama dengan istrinya. Sebelum ke Mekkah, ia dan keluarganya memang jarang bepergian ke luar wilayah kabupaten Lumajang. Kecuali, jika berziarah ke kyai atau sekali setahun "turun" ke Madura.

Bagi orang Madura, naik haji mempunyai makna sosial. Di samping mempunyai arti telah menunaikan rukun Islam yang ke lima, orang telah naik haji akan dipanggil *tuan*, dan prestisnya akan naik sehingga akan memperoleh penghargaan dan penghormatan oleh masyarakat lingkungannya. Karena itu, tidak heran bilamana tujuan hidup orang Madura yang utama adalah menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Lebih detail lihat dalam; Bustami Rahman, *Karakter Orang Madura di Surabaya, Beberapa Pikiran Mengenai Latar belakang dan Perkembangannya*. (Jember: Pusat-pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Jember. 1989), 66-98.

⁸⁷ Lihat Bustami Rahman, *Karakter Orang Madura di Surabaya, Beberapa Pikiran...70*.

aktif melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya seperti mengaji, membayar zakat fitrah dan sebagainya.⁸⁸

3. Islam dan Kepemimpinan Lokal Madura

Kepemimpinan lokal – informal atau formal – mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat Madura. Pemimpin lokal ini merupakan mediator antara dunia setempat dan dunia yang lebih luas, misalnya seorang kepala desa dapat bertindak sebagai penengah antara rakyat dan pemerintah, seorang kyai sebagai penengah antara penganut agama Islam lokal dan umat Islam lainnya. Para perantara ini, dalam hal-hal tertentu, mengontrol kesenjangan antara “orang terpelajar dan tidak terpelajar, orang kota dengan orang desa, modern dan tradisional, serta penguasa dan rakyat.”

Arti pentingnya kepemimpinan informal dalam masyarakat Madura sangat signifikan. Hal ini terlihat pada cerita tentang santri seorang kyai yang senang bermain sabung ayam, padahal dalam Islam hal ini dilarang. Lantas kyai tersebut berkunjung ke rumah santri tersebut untuk minta dimasakan sup ayam dari ayam yang menjadi jagoannya dalam bermain. Santri tersebut hanya bisa menuruti kemauan kyai gurunya tersebut yang sangat dihormatinya. Sang santri rela mengorbankan kegemarannya terhadap guru yang dihormati memperlihatkan betapa dijunjung tingginya pemimpin informal dalam masyarakat Madura untuk menentukan perilaku yang benar atau salah.⁸⁹

⁸⁸ Lihat dalam Markus Apriono, *Pertimbangan Status Sosial...* 54.

⁸⁹ Lebih detailnya lihat dalam Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris 1850 – 1940*. (Yogyakarta: Mata Bangsa Press. 2002), 322, Bandingkan juga dengan penelitian Soemanto R.B. *Suatu Telaah Deskriptif Tentang Perubahan Sosial di Masyarakat Desa Banyuwangsa, Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan*. Dalam *Madura V*,

Untuk pemimpin formal, orang Madura biasanya lebih banyak berhubungan dengan tingkatan kepemimpinan yang terbawah seperti kepala kampung atau kepala desa. Namun demikian mereka cenderung tetap beranggapan bahwa pemimpin informal lebih penting. Pemimpin formal mereka anggap hanya sebagai wakil dari tingkat yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Pemimpin informal, sebaliknya, dilihat sebagai wakil masyarakat setempat. Dengan demikian pemimpin informal ini bisa lebih berpengaruh pula di bidang politik, tepatnya terhadap perilaku politik mereka.

Sumber kepemimpinan formal juga berbeda dengan kepemimpinan informal. Kepala desa atau kepala kampung misalnya, dapat berkuasa oleh karena mereka memperoleh legitimasi dari pihak pemerintah. Dengan adanya legitimasi ini para pemimpin formal justru cenderung bertindak sebagai penerjemah keinginan-keinginan pemerintah yang harus diteruskan kepada atau dilaksanakan oleh rakyat. Namun, hanya mengandalkan pada legitimasi tersebut nampaknya tidak cukup. Para pemimpin formal masih merasa perlu pula untuk minta bantuan pada pemimpin informal dalam melaksanakan kepemimpinannya. Dengan demikian, bagi orang Madura pemimpin formal akan dirasakan kurang penting dari pada pemimpin informal.

J. Kerangka Pemikiran

Gerakan protes Islam lokal menentang kelompok Syi'ah di kabupaten Sampang dapat dipandang sebagai perilaku kolektif yang kreatif. Menurut

Kumpulan Makalah, Loka Karya Penelitian Sosial Budaya. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981), 112.

Tarrow,⁹⁰ gerakan sosial tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan terjadi di bawah *setting* tertentu dan mempunyai latar belakang yang panjang, antara lain gerakan sebelumnya yang gagal. Motifnya juga bermacam-macam, bisa ancaman dari luar atau dari dalam, tujuan (ide, gagasan, ideologi) tertentu, dan juga kondisi sosial yang tidak tertahankan lagi (penindasan, pembohongan, kesewenang-wenangan, kemelaratan dan sebagainya) serta persaingan. Gerakan sosial merupakan usaha-usaha yang digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan-tujuan bersama dan ikatan solidaritas untuk melakukan perubahan melalui tindakan sosial terhadap otoritas pemerintah atau pihak-pihak penentang lainnya.

Namun, gerakan sosial itu “bermain” di ranah Masyarakat sipil (*civil society*) yang merupakan arena bagi gerakan sosial, di samping dapat pula menjadi arena hegemoni negara. Gerakan sosial yang merupakan himpunan dari berbagai organisasi gerakan sosial atau aliansi dari berbagai organisasi gerakan sosial seperti gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia, gerakan perempuan senantiasa berupaya memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi dalam menghadapi negara. Dalam kaitan ini, organisasi gerakan sosial tentu saja dapat melakukan perubahan sosial melalui arena masyarakat sipil.

Kemunculan gerakan sosial tidak luput dari faktor *grievance* (keluhan) atau *social discontent* (perasaan tidak puas masyarakat). Faktor *grievance* ini yang mendorong munculnya gerakan sosial di dalam suatu masyarakat tertentu,

⁹⁰Lihat lebih lanjut dalam Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, second edition. (United Kingdom: Cambridge University Press. 1998), 45.

sebab *grievance* yang dialami masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah tidak mampu lagi dikelola dan dipikulnya maka melahirkan gerakan sosial⁹¹

Konsep *grievance* ini bersumber dari pemikiran Karl Marx yang melihat perpecahan di dalam masyarakat kapitalis sebagai potensi yang dapat dimobilisasi. Dalam pengertian lain, para pemilik modal yang mengeskplotasi buruh terus-menerus, dan kemudian buruh menyadari bahwa dirinya dieksploitir guna kepentingan akumulasi modal. Kondisi yang dieksploitatif dari pemilik modal inilah yang disebut sebagai *grievance* bagi kaum buruh. Agar buruh bebas dari *grievance*, maka ia harus merebut alat-alat produksi dari tangan pemilik modal (kapitalis). Faktor *grievance* ini yang memungkinkan lahirnya protes-protes kaum buruh, bahkan pemogokan masal atau menguasai alat-alat produksi. Faktor *grievance* inilah, boleh jadi, yang mendorong munculnya gerakan protes kelompok Islam lokal Madura di Kabupaten Sampang, seperti tampak dalam resistensi kelompok Islam lokal terhadap eksistensi kelompok Syi'ah.

Namun, tidak hanya faktor *grievance* yang mendorong lahirnya gerakan sosial, melainkan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang terbuka mempunyai andil dalam merangsang lahirnya gerakan sosial. Menurut Dela Porta dan Mario Diani,⁹² konsep *political opportunity structure* sangat relevan untuk membangun gerakan sosial karena dapat menjelaskan bahwa peluang politik yang terbuka akan mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial untuk memanfaatkannya sebagai ruang untuk melakukan tekanan

⁹¹ Lihat dalam Sorensen, Aage B. "Toward a Sounder Basis for Class Analysis", *American Journal of Sociology* 105, 1523-1558 (Vermont: 2000), 34.

⁹² Periksa lebih detail dalam Dela Porta, Donatella & Mario Diani, *Social Movements; An Introduction*. (United Kingdom: Blackwell Publisher Inc. 1988), 9.

atau mendesakkan agenda-agenda gerakan agar dapat mencapai tujuan gerakan sosialnya. Bahkan, tidak hanya peluang politik di tingkat lokal dan nasional, melainkan terbukanya peluang politik di tingkat internasional pun ikut mendorong muncul dan meluasnya gerakan sosial.

Dalam konteks lokal dan nasional, struktur kesempatan politik itu adalah sejak tumbangny pemerintah Orde Baru. Sebab, pemerintahan pasca Orde Baru berusaha keras membangun demokrasi, disisi lain elit politik baik di tingkat lokal dan nasional berusaha mencari pijakan atau dukungan masyarakat, sehingga elit politik sangat apresiatif dengan gerakan protes yang membawa aspirasi masyarakat, dan banyak elite politik yang berani berseberangan dengan pemerintah, di samping adanya konflik di antara elit politik itu sendiri.

Kondisi ini tentunya membuka ruang bagi rakyat untuk membangun gerakan sosial. Sebab, struktur kesempatan politik yang terbuka itu mendorong munculnya gerakan seperti gerakan gay --- sebagai salah satu gerakan sosial baru --- di Indonesia secara terbuka. Sebab, gerakan gay yang dipinggirkan selama pemerintahan rezim Orde Baru berkuasa, tidak memiliki ruang untuk bergerak secara terbuka. Namun, dengan adanya peluang politik di masa reformasi, gerakan gay muncul secara terbuka. Karena itu, bagi aktor gerakan sosial terbukanya struktur kesempatan politik dapat dilihat sebagai peluang untuk mendesakkan agenda-agenda dari gerakan sosialnya, seperti memberantas korupsi.

Namun gerakan sosial akan menghadapi rintangan dalam meraih hasil yang diharapkan bilamana tidak didukung organisasi gerakan yang baik. Dengan

kata lain, meski terdapat peluang politik tetapi gerakan sosial tetap sukar berkembang bila tidak didukung oleh kemampuan mengorganisir massa atau membangun jaringan antar kelompok-kelompok gerakan, maka akan menuai kegagalan.

Dalam kaitan ini, dibutuhkan konsep mobilisasi struktur (*mobilizing structure*) yang dapat menjelaskan bahwa gerakan sosial itu membutuhkan organisasi, baik organisasi formal maupun tidak. Namun, organisasi gerakan gerakan haruslah memiliki struktur yang mudah untuk dimobilisir. Dalam konsep *mobilizing structure* ini menekankan pentingnya peranan aktor atau *agent* untuk memobilisasi struktur organisasi agar gerakan sosial mencapai hasilnya.

Dalam konteks ini, organisasi Islam lokal Aswaja (NU dan kelompok *civil society* lainnya) yang menentang eksistensi kelompok Syi'ah, tentu tidak lepas dari peranan aktornya dalam memobilisasi massa sehingga meletuslah konflik yang berakhir dengan pengusiran kelompok Syi'ah dari Kabupaten Sampang.

Menurut Mc Adam, McCarthy, dan Zald,⁹³ mobilisasi struktur itu dapat diartikan sebagai “kendaraan” untuk melakukan mobilisasi orang-orang lain untuk menjadi partisipan aksi-kolektif, atau mengajak orang lain agar dapat berpartisipasi di dalam aksi kolektif. Mobilisasi struktur ini dapat dilakukan pada kelompok-kelompok lapisan bawah, organisasi-organisasi, dan jaringan informal guna membangun blok kolektif dari gerakan sosial dan revolusi.

⁹³ Lihat lebih detail dalam McAdam Doug, Jhon D. McCarthy, Meyer N Zald. *Comparative Perspectives On Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. (United Kingdom: Cambridge University Press. 1999), 3.

Mobilisasi struktur ini sangat menentukan baik dalam membangun maupun meraih tujuan dari gerakan sosial. Artinya, meski peluang politik terbuka dan dapat mendorong gerakan sosial semakin membesar, tetapi kondisi ini akan menjadi sia-sia bila aktor atau agen tidak mampu memobilisasi massa. Di sisi lain, organisasi pun harus mempunyai struktur yang mudah untuk dimobilisasi. Dalam gerakan organisasi sosial kerap menggunakan organisasi rakyat, maka struktur organisasi rakyat ini harus memberikan ruang untuk memudahkan aktor atau agen melakukan mobilisasi, sehingga agenda gerakan membuahkan hasil.

Gerakan sosial dalam mencapai tujuannya membutuhkan pula inovasi tindakan kolektif (*innovative collective action*). Konsep ini berkaitan dengan pilihan strategi aksi dalam mencapai tujuan gerakan sosial. Di dalam strategi inovasi kolektif ini terdapat dua strategi besar. *Pertama*, apakah aktor atau *agents* akan menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) di dalam mencapai tujuannya, atau sebaliknya aktor dan *agents* akan menggunakan cara-cara nir-kekerasan (*non-violence*). *Kedua*, apakah aktor dan *agent* akan mengkombinasikan antara cara-cara kekerasan dengan cara-cara tanpa kekerasan guna mencapai tujuan gerakan sosial⁹⁴.

Menurut Gamson,⁹⁵ kelompok-kelompok gerakan yang menggunakan strategi aksi “kekuatan dan kekerasan” terhadap para penentangannya cenderung lebih berhasil dari pada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan pilihan strategi aksi dengan kekerasan. Namun, pilihan strategi aksi tanpa kekerasan ada

⁹⁴ Lihat dalam Charles Tilly, Doug McAdam & Tarrow. *The Dynamics of Contentious*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2002), 33.

⁹⁵ Periksa lebih lanjut dalam, Gamson, William. *The Strategy of Social Protest*, (2nd edition). (Baltimore: wordworth. 1990), 322.

juga yang membuahkan hasil seperti gerakan sosial di India yang dipelopori Mahatma Gandhi ketika menentang dominasi kekuasaan Inggris. Begitu pula dengan gerakan rakyat Philipina yang dikenal dengan "*people power*" dalam menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Strategi aksi tanpa kekerasan pun menjadi pilihan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa Indonesia ketika menjatuhkan Presiden Soeharto.

Untuk lebih memperjelas kaitan antara teori gerakan sosial yang dipakai dalam penelitian ini dengan realitas empiris, berikut adalah alur pemikiran penelitian yang menggambarkan secara singkat tentang gerakan protes Islam lokal Madura di Sampang dalam menentang ideologi keagamaan Syi'ah, bentuk-bentuk gerakan protes, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan protes, serta dampak gerakan protes yang dirasakan oleh kedua komunitas yang berseteru.

Tabel 2.2
Alur Pemikiran Penelitian